



LP2KD LAPORAN

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin, Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanawata'ala, Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 telah tersusun.

Kemiskinan merupakan permasalahan tematik yang kompleks dan menjadi salah satu isu strategis prioritas Nasional untuk ditangani secara bersama. Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 tahun 2022; tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah menargetkan angka kemiskinan ekstrem tahun 2024 dapat diturunkan secara signifikan mendekati 0%. Dalam upaya mewujudkan cita cita luhur Presiden Joko Widodo tersebut, dibutuhkan sinkronisasi, koordinasi dan upaya bersama yang melibatkan seluruh Stakeholder, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara sinergi dan berkesinambungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pada pemerintah desa dan kelurahan.

Dokumen LP2KD ini disusun berdasarkan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelerasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi. Dokumen LP2KD Ini merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

LP2KD ini secara garis besar berisi pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2023. Dokumen ini berisi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan mulai dari rencana tagging dan realisasi anggaran program penanggulangan kemiskinan. LP2KD tahun 2023 disusun oleh tim TKPK Provinsi Sulawesi Selatan berupaya memberi gambaran yang komprehensif kepada para pembaca tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh elemen baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah

daerah dalam mengejar target angka kemiskinan dan disparitas kemiskinan antara desa dan kota semakin mengecil.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan kontribusinya dalam penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan lintas sectoral dalam merumuskan kebijakan dalam Upaya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Desember 2023

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
Selaku Ketua

TKPK Provinsi Sulawesi Selatan



Dr. SETIAWAN ASWAD, MDevPlg

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19730825 199203 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| DAFTAR GRAFIK..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2. TUJUAN DAN MANFAAT LP2KD..... | 3 |
| 1.3. DASAR HUKUM..... | 4 |
| 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..... | 6 |
| BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN | 7 |
| 2.1. KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN | 7 |
| 2.2. TINJAUAN KELEMBAGAAN | 8 |
| 2.2.1. Peran Kelembagaan Pemerintah..... | 14 |
| 2.2.2. Peran Kelembagaan Swasta | 14 |
| 2.2.3. Peran Kelembagaan Masyarakat..... | 15 |
| 2.2.4. Peran Akademisi | 15 |
| 2.2.5. Peran Media | 16 |
| 2.3. TINJAUAN PENGANGGARAN UNTUK KEMISKINAN EKSTREM..... | 16 |
| BAB 3 HASIL CAPAIAN DAN ANALISIS..... | 54 |
| 3.1 REALISASI TARGET PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN..... | 54 |
| 3.1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan | 24 |
| 3.1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, Maret 2022 – Maret 2023 | 56 |
| 3.1.3. Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, Maret 2022 – Maret 2023..... | 57 |
| 3.1.4. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan | 60 |
| 3.1.5. Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Provinsi Sulawesi Selatan | 63 |
| 3.2 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN..... | 65 |
| 3.2.1. Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023..... | 71 |
| 3.3 REALISASI ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2023..... | 93 |
| 3.4 STRATEGI PENGURANGAN BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT | 94 |
| 3.5. COORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023 | 95 |
| 3.5.1. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023..... | 95 |
| 3.5.2. Kegiatan Monitoring Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 | 111 |

| | | |
|--|--|-----|
| 3.6. | STRATEGI SINERGI KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI:..... | 125 |
| BAB 4 STRATEGI KEBIJAKAN DAN MATRIKS RENCANA AKSI TAHUN 2024 | | 126 |
| 4.1. | STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN..... | 126 |
| 4.2. | UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN :..... | 128 |
| 4.3. | RENCANA PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 | 130 |
| 4.4. | PEMUTAKHIRAN DATA P3KE | 152 |
| BAB 5 PENUTUP | | 156 |
| 5.1. | KESIMPULAN | 156 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 2.1 Proporsi Pendanaan P3KE..... | 29 |
| Tabel 2.2 Sebaran Program P3KE Tahun 2023 | 31 |
| Tabel 3.1 Indes Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indkes Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Selatan menurut daerah Maret 2022-Maret 2023..... | 57 |
| Tabel 3.2 Perkembangan Garis Kemiskinan, Maret 2022-Maret 2023 | 58 |
| Tabel 3.3 Garis Kemiskinan per kapita Rymah Tangga Miskin, September 2022-Maret 2023..... | 59 |
| Tabel 3.4 Jumlah KK Desil 1, Desil 2 dan Desil 3 berdasarkan data P3KE | 64 |
| Tabel 3.5 Alokasi Belanja untuk Program Penanggulangan Kemiskinan per Klaster, tahun 2023 | 69 |
| Tabel 3.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 | 72 |
| Tabel 4.1 Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 | 132 |
| Tabel 4.2 Rekap kemiskinan Ekstrem TNP3K x P3KE x data Verval Kabupaten/Kota Tahun 2023..... | 152 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan, Maret 2022- Maret 2023 | 55 |
| Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (Ribu Orang) menurut Daerah, Maret 2022-Maret 2023 | 56 |
| Tabel 3.3 Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, maret 2023 | 62 |
| Tabel 3.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran P3KE Tahun 2023..... | 93 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi global maupun nasional. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf kehidupan yang layak dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumberdaya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas juga rendah. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik dan keamanan.

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dibanding negara sedang berkembang dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relatif tinggi.

Pemerintah Sulawesi Selatan senantiasa memiliki komitmen untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, di mana pada tahun 2013 sebesar 863.230 orang atau



10,32%, menjadi 779.640 orang atau 9,87% di tahun 2018. Komposisi penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada bulan september Tahun 2018 terdiri dari 168.700 jiwa di daerah perkotaan dan 610.940 jiwa di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 80% penduduk miskin yang berada di desa, dan 20% berada di perkotaan.

Pada kondisi sejak terjadinya Pandemi Covid 19 hingga awal semester kedua 2020, memperlihatkan jumlah orang miskin di Indonesia dan juga di Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan awal World Bank tahun 2020, memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia selama Covid 19 bertambah antara 3-4 juta orang miskin. Sementara itu di Sulawesi Selatan jumlah dan persentase penduduk miskin naik pada Maret 2020 sebesar 776,83 ribu jiwa atau 8,72 persen. Kondisi ini memerlukan intervensi yang nyata dari pemerintah dan stakeholders lain untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, melalui kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2023, serta upaya sinergi antar OPD terkait serta peran swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Tokoh masyarakat, dan juga media, maka diharapkan program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan bisa efektif menjawab menurunkan angka kemiskinan dan sebagai jawaban atas tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Sulawesi Selatan.

Untuk mempercepat sinergi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan telah dibuat, diantaranya dengan membentuk Surat Keputusan Gubernur Nomor 455/II/2019 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang merupakan amanah dari Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota. Disadari bahwa tanggung jawab pencapaian pengurangan kemiskinan memerlukan peran serta pemerintah daerah, swasta dan masyarakat secara bersama-sama dalam mengatasi permasalahan yang dialami penduduk/rumah tangga miskin. Ketepatan sasaran penerima manfaat juga masih menjadi salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius.



Sejalan dengan upaya mendorong peran pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan, maka rencana penanggulangan kemiskinan harus mengacupadasuatulandasan (dokumen) sebagai hasil identifikasi dan kajian secara mendalam terkait engan permasalahan dan kondisi lokalita sehingga penanggulangan kemiskinan didaerah dalam berjalan dengan optimal. Sejalan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Kemiskinan (RNPK), maka perlu disusun dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) sebagai pedoman bersama pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan yang terjadi di daerah sesuai dengan karakteristik dan sumberdaya yang tersedia.

LP2KD merupakan wujud komitmen pemerintah dalam proses desentralisasi sehingga daerahlampu mengidentifikasi dan mengatasi kemiskinan dengan, kemampuan dan wewenang yang dimiliki. Otonomi daerah juga mengisyaratkan kewajiban serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih akomodatif dan responsif serta memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ruang pengambilan keputusan.

1. 2. TUJUAN DAN MANFAAT LP2KD

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan sebagai bagian dari tahapan sistematis proses penanggulangan kemiskinan yang kemudian menjadi acuan pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi 24 kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang mengikutsertakan partisipasi seluruh stakeholder pembangunan, meliputi pemerintah, swasta, masyarakat, dan berbagai pihak untuk menjamin upaya-terkoordinasi dan terintegrasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Tujuan dari Dokumen LP2KD ini adalah:

1. Menegaskan komitmen pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku



- usaha, lembaga internasional, dan pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan dalam daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya;
2. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar (*right based approach*) dalam perumusan strategi dan kebijakan;
 3. Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs).

Manfaat yang diharapkan dari Dokumen LP2KD ini adalah Mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi model pentahelix yaitu kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tenaga ahli akademisi, pelaku usaha, lembaga internasional, peran media, dan pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan.

1. 3. DASAR HUKUM

Penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan dilakukan secara komprehensif dan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder, dalam pelaksanaannya pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sektor usaha dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab yang sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

Untuk itu dalam menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif sekaligus sebagai tindak lanjut dari strategi tingkat nasional, maka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan secara berkeadilan tanpa perbedaan. Sebagai sebuah dokumen strategis yang menjadi acuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dokumen LP2KD sebaiknya disusun secara sistematis dan terstruktur.



Untuk melaksanakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010.

Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan di provinsi dan pembinaan penanggulangan kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Beberapa landasan hukum terkait penyusunan Dokumen LP2KD, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Indonesia (SPPN);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang RKP 2011;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Indonesia Tahun 2010;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;



9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kab./Kota;
13. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
15. Surat Keputusan Gubernur Nomor 455/II/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

- **BAB I PENDAHULUAN**
- **BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**
- **BAB III CAPAIAN DAN ANALISIS**
- **BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT**
- **BAB V PENUTUP**



BAB 2

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2.1. KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Untuk mengatur mekanisme kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 523/II/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 pada Pasal 4, TKPK Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya dengan fungsi sebagai berikut:

TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan RPKD dan rencana aksi provinsi;
2. Koordinasi penyusunan rancangan RKPD provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
3. Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
4. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;



5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
7. Harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan koordinasi secara berkala yaitu dengan melaksanakan koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat koordinasi pertama bertujuan untuk menindaklanjuti rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2023 serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) tahun anggaran 2023. Sedangkan rapat koordinasi kedua dilaksanakan sebagai salah satu upaya melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun Anggaran 2023.

2.2. Tinjauan Kelembagaan

Di tahap awal, pada tataran kelembagaan, keseriusan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tampak pada pembentukan Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK). Lembaga ini didirikan pada April 2001 di bawah koordinasi Wakil Presiden. BKPK terbentuk atas desakan International Monetary Fund (IMF) kepada pemerintah untuk segera melakukan upaya penanggulangan kemiskinan.

Namun lembaga ini tidak berumur panjang dan kemudian berganti nama menjadi Komite Pengentasan Kemiskinan (KPK). Komite ini dibentuk pada tahun 2001



melalui Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan. KPK diketuai oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial. Secara normatif, lembaga ini berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan, dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan. Tugas utama komite ini adalah menyusun Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang merupakan dokumen induk dan acuan utama dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. SNPK relatif komprehensif karena tidak hanya fokus pada kebijakan dan Rencana Penanggulangan kemiskinan, tetapi juga pada diagnosis kemiskinan, evaluasi atas kebijakan sebelumnya, mekanisme pelaksanaan, sistem koordinasi, dan sistem monitoring dan evaluasi.

Fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan adalah: (1) Merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan Panduan Umum yang diperlukan bagi pelaksanaannya di daerah; (2) Memantau pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah dan memberikan panduan kebijakan lanjutan yang ditetapkan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing; (3) Membina pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah; dan (4) Melaporkan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan kepada Presiden.

Karena alasan efektifitas, pemerintah merestrukturisasi KPK menjadi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Keberadaan TKPK diharapkan melanjutkan dan memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh KPK. Tugas dari TKPK adalah melakukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Indonesia melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengaktifkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi



Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden ini dikeluarkan untuk memastikan langkah-langkah penanganan dan pendekatan kemiskinan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Peraturan Presiden ini berfokus pada upaya meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan penguatan kelembagaan yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Pada tahun 2010, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) antara lain untuk merespons situasi melambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatnya kesenjangan. Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Lembaga ini memiliki dua mandat utama, yaitu: (1) Memperbaiki sasaran program berbasis rumah tangga dan wilayah; dan (2) Memperbaiki mekanisme penyaluran program. Tugas pokok lembaga ini, antara lain: (1) Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; (2) Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga; (3) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan (4) Dalam melaksanakan tugasnya, TNP2K dibantu oleh Sekretaris Eksekutif.

Pada tahun 2015, kembali diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan tujuan untuk



melakukan penyesuaian keanggotaan TNP2K karena adanya perubahan Susunan Kabinet Periode 2014-2019.

Sedangkan untuk mengefektifkan koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Lembaga ini berfungsi sebagai mitra kerja TNP2K, yang dibentuk di tingkat nasional dengan Peraturan Presiden yang sama.

TKPK Daerah bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh TNP2K. Hasil pelaksanaan tugas tersebut masing-masing dilaporkan oleh TKPK Provinsi kepada Gubernur dan TNP2K; dan oleh TKPK Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi.

Uraian dari tugas TKPK Daerah menyangkut koordinasi penanggulangan kemiskinan di satu sisi, dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di sisi lain, selanjutnya diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa TKPK Provinsi mempunyai tugas, yaitu: (1) melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di provinsi; dan (2) mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi. Sedangkan TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas, yaitu: (1) melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota; dan (2) mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.

Dalam rangka mendukung penguatan substansi terkait penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab tersebut, TKPK Daerah diharapkan secara berkelanjutan mengembangkan kapasitas, khususnya dalam: (i) menganalisis kondisi



kemiskinan daerah; (ii) merancang anggaran belanja atau pengeluaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan di daerah; dan (iii) menyusun instrumen yang tepat untuk melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan, pemerintah daerah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 523/II/ Tahun 2021 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023. Di dalam Keputusan Gubernur tersebut disebutkan bahwa TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Di dalam Keputusan Gubernur tersebut, disebutkan bahwa TKPK mempunyai dua tugas utama, yaitu: (1) melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan (2) mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi. Untuk melaksanakan tugas pertama, TKPK Provinsi menyelenggarakan fungsi, yaitu: (i) pengoordinasian penyusunan LP2KD Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan; (ii) pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD; (iii) pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD; (iv) pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan (v) pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas kedua, TKPK Provinsi menyelenggarakan fungsi, yaitu: (i) pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; (ii)



pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; (iii) penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik; (iv) pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan; (v) pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan (vi) penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Susunan keanggotaan TKPK Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:

Penanggung Jawab : Gubernur Sulawesi Selatan

Ketua : Wakil Gubernur Sulawesi Selatan

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Sekretariat

Kepala : Sekretaris Bappeda Provinsi Sulsel

Wakil Kepala : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Sulawesi Selatan

Anggota : Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Dinas Sosial Provinsi Sulsel



Kelompok Kerja:

1. Kelompok Pendataan dan Informasi
 - Pengembangan Kemitraan
 - Pengaduan Masyarakat
2. Kelompok Program:
 - Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
 - Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
 - Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
 - Program-program lainnya

Struktur Kelompok Kerja dan Kelompok Program terdiri atas satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua, dan beberapa Anggota Kelompok.

2.2.1. Peran Kelembagaan Pemerintah

Dalam rangka mendukung penguatan substansi terkait penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab tersebut, TKPK Daerah diharapkan secara berkelanjutan mengembangkan kapasitas, khususnya dalam: (i) menganalisis kondisi kemiskinan daerah; (ii) merancang anggaran belanja atau pengeluaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan di daerah; dan (iii) menyusun instrumen yang tepat untuk melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

2.2.2. Peran Kelembagaan Swasta

Memberikan dukungan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan miskin melalui pembinaan dan kerjasama lewat bapak angkat. Memberikan bantuan berupa modal usaha, bimbingan teknis, dan juga penguatan kapasitas kelompok-kelompok UKM. Harapannya dengan model CSR pihak swasta dapat terus



menjadi mitra pemerintah daerah dalam rangka memberdayakan usaha kecil menengah agar mampu berdiri sendiri dan dapat mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan skala usahanya ke level yang lebih maju lagi.

2.2.3. Peran Kelembagaan Masyarakat

Lembaga masyarakat menekankan pada partisipasi masyarakat dalam proses – proses pembangunan di level komunitas (grassroot). Peran para NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan komunitas akan memberi kekuatan tersendiri dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sebagai salah satu sasaran program bantuan dari pemerintah, kelompok-kelompok rentan dan masyarakat miskin akan mudah dikuatkan dengan proses pendampingan dari para NGOs dan peran para pioneer dan pemuka masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat.

2.2.4. Peran Akademisi

Para akademisi memainkan peran yang penting dalam memberikan masukan dan pandangan sesuai dengan ilmu dan keahlian pada bidangnya masing-masing. Melalui serangkaian penelitian dan observasi serta kekayaan ilmu pengetahuan para ilmuwan dan civitas akademika dapat memberikan kontribusinya dalam proses perencanaan pembangunan dan pemerintahan, serta bidang-bidang lainnya yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan. Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan Gubernur Sulawesi Selatan membentuk sebuah Tim ahli yang disebut Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan. Tim ini adalah sebagian besar adalah para akademisi yang berlatar belakang yang berbeda-beda. TGUPP ini adalah tim ahli yang bertugas memberi pertimbangan kepada Gubernur dan wakil Gubernur dalam proses pembuatan kebijakan dan juga pembuatan peraturan Daerah. Melalui Tim khusus ini, Gubernur dan wakil Gubernur memiliki landasan yang kuat dalam mengambil keputusan, karena telah dibackup oleh para tenaga ahli yang selalu siap untuk memberikan bantuan pemikiran untuk meramu dan membuat keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah dan sesuai dengan kebutuhan daerah.



2.2.5. Peran Media

Tidak kalah pentingnya dari beberapa elemen yang telah didiskusikan sebelumnya yaitu peran media dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Melalui Media berfungsi sebagai wadah informasi diharapkan akan menjadi penyeimbang antara pendapat pemerintah dan pendapat dari public. Melalui kesiapan adanya data dan fakta sesuai dengan realita yang ada di lapangan, maka peran media sangatlah penting memberi pencerahan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan informasi yang valid atau sesuai dengan situasi di lapangan. Melalui Media elektronik, media cetak dan juga media social, diharapkan masyarakat akan lebih mudah dalam mempercepat akses informasi kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Lebih-lebih terkait dengan bantuan –bantuan sosial yang datang dari pemerintah pusat dan daerah yang ditujukan kepada masyarakat miskin baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan. Melalui Media masyarakat atau public lebih mendapatkan informasi dari berbagai pihak, sehingga masyarakat akan lebih cerdas dalam menyaring-informasi dan data yang datang kepada masyarakat di level bawah.

2.3 Tinjauan Penganggaran Untuk Kemiskinan Ekstrem

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta pembinaan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, penanggulangan kemiskinan di daerah melibatkan 20 (dua puluh) Perangkat Daerah yang didasarkan pada kewenangan dan urusan yang diemban oleh masing-masing daerah. Pada Tahun 2023 anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem mengalami perubahan akibat adanya refocusing anggaran yang berdampak pada pengalokasian dana untuk membiayai program-program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan dana untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dengan OPD sebesar Rp. 626.719.250.477,- atau sebesar 7,97% dari jumlah total APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar Rp.



7.862.411.725.735,- yang tersebar pada 20 (dua puluh) Perangkat Daerah diantaranya :

1. Dinas Sosial

Dinas Sosial yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang sosial. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 1.550.000.000,- atau 3,10% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 49.981.924.673,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :

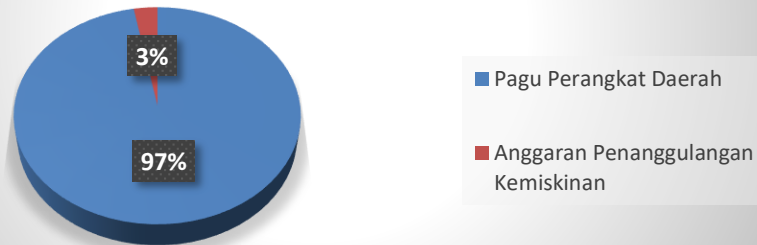


2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Besarana anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 8.637.341.590,- atau 3% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 288.126.681.277,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :



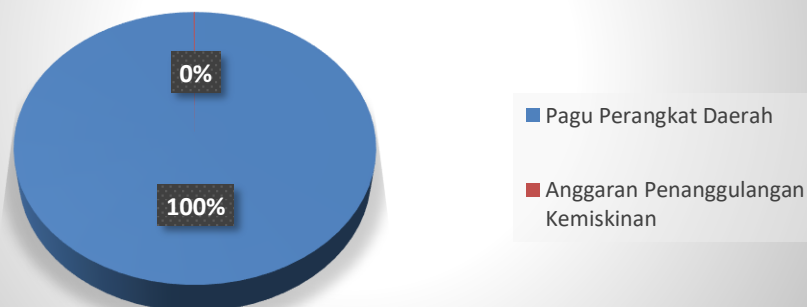
Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Dinas Kesehatan Tahun 2023



3. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pendidikan pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 3.309.096.940,- atau 0,11% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 3.117.910.013.772,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pendidikan Tahun 2023

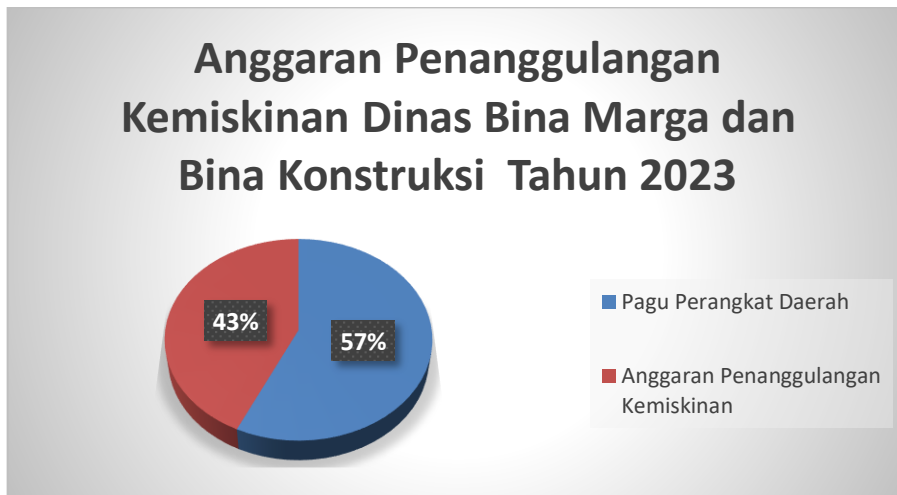


4. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang bina marga dan konstruksi pada tahun 2023 dengan



alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 179.348.924.343,- atau 75,62% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 237.185.583.109,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :



5. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.8.798.015.000,- atau 8,80% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 100.020.581.653,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :



6. Dinas Ketahanan Pangan

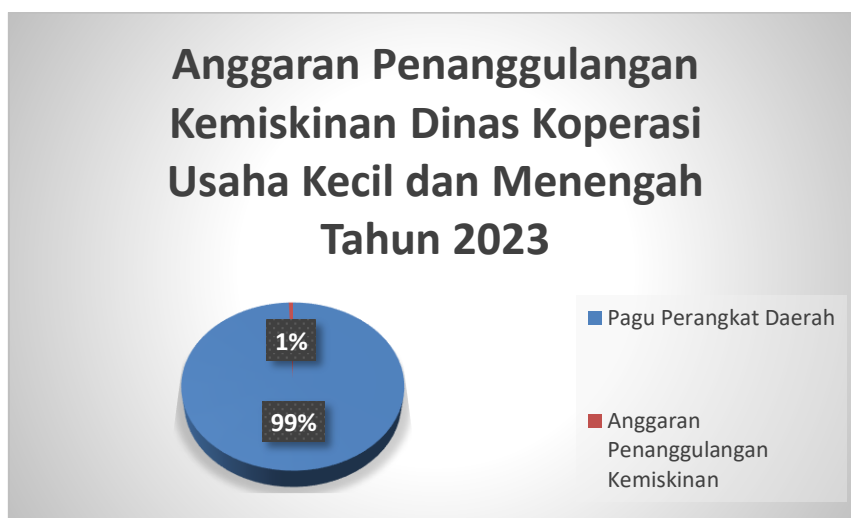


Dinas Ketahanan Pangan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 1.840.000.000,- atau 7,47% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 24.635.492.911,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :



7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

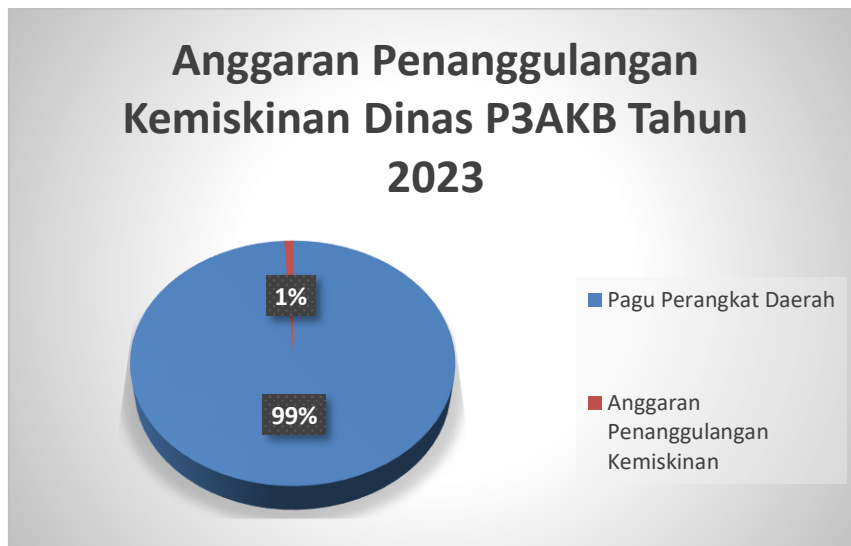
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.189.658.000,- atau 0,66% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 28.949.940.574,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :





8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.172.000.000,- atau 0,93% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 18.411.416.482,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :

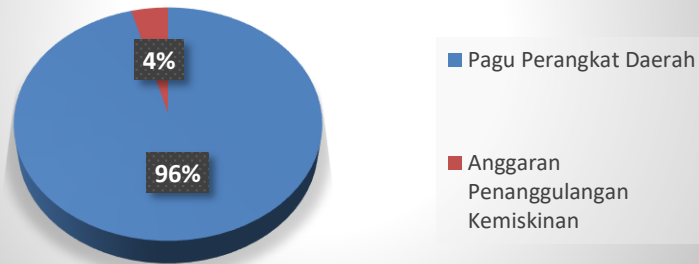


9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.1.689.998.800,- atau 4,40% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 38.423.479.310,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :



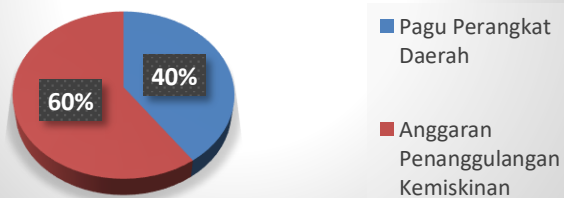
Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023



10. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang sumber daya air, cipta karya dan tata ruang pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.167.428.530.646,- atau 148% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 249.428.098.500,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :

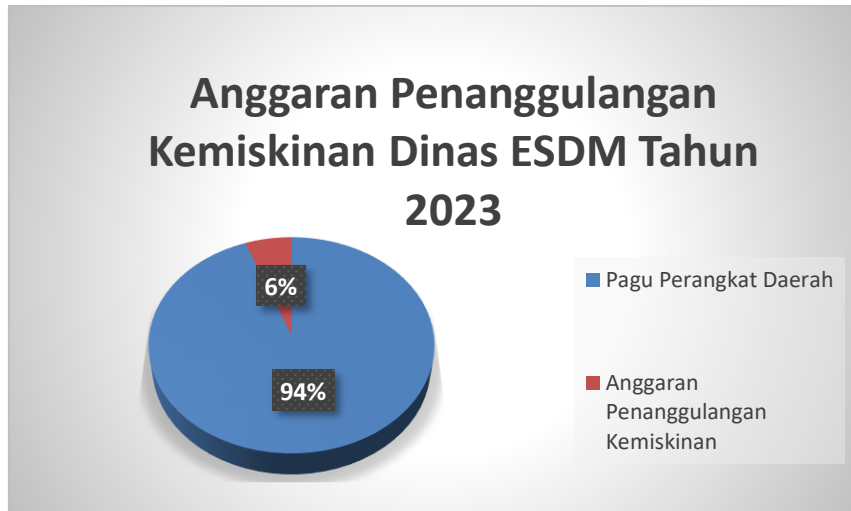
Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2023



11. Dinas Energi Sumber Daya Mineral



Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineral pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.1.374.877.964,- atau 6% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 22.539.699.098,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :



12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.4.662.087.600,- atau 12% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 35.582.237.672,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :



13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.7.155.154.064,- atau 19,42% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 36.846.640.064,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :





14. Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura

Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.28.250.000.000,- atau 5% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 594.437.042.381,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :



15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.100.000.000,- atau 0% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 27.535.927.168,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :



16. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.899.994.000,- atau 1% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp.92.800.400.587,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :

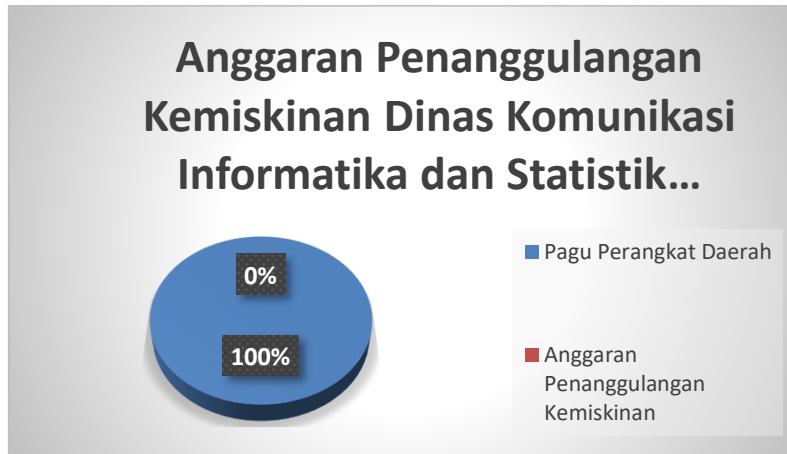


17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Persandian yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik



persandian dan kehutanan pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.20.000.000,- atau 0% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp.61.623.242.840,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :



18. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.153.989.000,- atau 1% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp.10.381.108.310,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :





19. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang keuangan dan asset daerah pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.129.074.263.676,- atau 4% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp.2.846.715.807.816,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :



20. Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.65.751.000,- atau 0% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp.62.875.975.392,- yang tergambar pada grafik di bawah ini :



Jika dilihat dari proporsi pendanaan pada masing-masing perangkat daerah diatas, maka alokasi dana untuk pencapaian penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Proporsi Pendanaan P3KE

| NO | OPD | PAGU APBD PERUBAHAN 2023 | ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN OPD 2023 | % TAHUN 2023 |
|----|---|--------------------------|---|--------------|
| 1 | Dinas Sosial | 49.981.924.673 | 1.550.000.000 | 3,10% |
| 2 | Dinas Kesehatan | 288.126.681.277 | 8.637.341.590 | 3,00% |
| 3 | Dinas Pendidikan | 3.117.910.013.772 | 3.309.096.940 | 0,11% |
| 4 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | 237.185.583.109 | 179.348.924.343 | 75,62% |
| 5 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 100.020.581.653 | 8.798.015.000 | 8,80% |
| 6 | Dinas Ketahanan Pangan | 24.635.492.911 | 1.840.000.000 | 7,47% |
| 7 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 28.949.940.574 | 189.658.000 | 0,66% |
| 8 | Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana | 18.411.416.482 | 172.000.000 | 0,93% |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 38.423.479.310 | 1.689.998.800 | 4,40% |
| 10 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang | 167.428.530.646 | 249.428.098.500 | 148,98% |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|--------------|
| 11 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral | 22.539.699.098 | 1.374.877.964 | 6,10% |
| 12 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 35.582.237.672 | 4.662.087.600 | 13,10% |
| 13 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 36.846.640.064 | 7.155.154.064 | 19,42% |
| 14 | Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura | 594.437.042.381 | 28.250.000.000 | 4,75% |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 27.535.927.168 | 100.000.000 | 0,36% |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 92.800.400.587 | 899.994.000 | 0,97% |
| 17 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Persandian | 61.623.242.840 | 20.000.000 | 0,03% |
| 18 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 10.381.108.310 | 153.989.000 | 1,48% |
| 19 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 2.846.715.807.816 | 129.074.263.676 | 4,53% |
| 20 | Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah | 62.875.975.392 | 65.751.000 | 0,10% |
| JUMLAH | | 7.862.411.725.735 | 467.597.370.260 | 5,95% |

Anggaran tersebut pada tahun 2023 tersebar pada 31 Program yang dilaksanakan oleh 20 (dua puluh) Perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Tabel. 2.2 Sebaran Program P3KE Tahun 2023

| No | Tujuan Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan Pendapatan | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | 1.689.998.800 |
| DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA | | | | | | |
| 2 | Meningkatkan Pendapatan | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan | 28.250.000.000 |
| DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | | | | | | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|--|---|----------------|
| 3 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan jaringan Irigasi Permukaan | 18.305.666.051 |
| 4 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi jaringan Irigasi Permukaan | 44.797.028.771 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|----------------|
| 5 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Bendung Irigasi | 17.745.057.200 |
| 6 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan | 20.081.396.800 |
| 7 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 61.358.599.739 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|----------------|
| 8 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Penataan Bangunan dan Lingkungan | 87.140.349.939 |
| DINAS SOSIAL | | | | | | |
| 9 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS SOSIAL | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 480.000.000 |
| 10 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS SOSIAL | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 720.000.000 |
| 11 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS SOSIAL | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 350.000.000 |
| DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | | | | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|-------------|
| 12 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 298.024.000 |
| 13 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 213.139.000 |
| 14 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | KAWASAN PERMUKIMAN | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 194.857.000 |
| 15 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 924.828.357 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---------------------------------------|---|-------------|
| 16 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 924.828.357 |
| 17 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 924.828.357 |
| 18 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 924.828.357 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|-------------|
| 19 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 899.936.688 |
| 20 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 924.941.974 |
| 21 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 924.941.974 |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---------------|
| 22 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 4.662.087.600 |
| DINAS PENDIDIKAN | | | | | | |
| 23 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pengadaan perlengkapan peserta didik, | 999.900.000 |
| 24 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pembangunan USB | 2.309.196.940 |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|----|------------------------------|--|---|--|--|-------------|
| 25 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 46.400.000 |
| 26 | Meningkatkan Pendapatan | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 25.600.000 |
| 27 | Meningkatkan Pendapatan | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 100.000.000 |



**(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|-------------|
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | |
| 28 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 100.000.000 |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | | | | | | |
| 29 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | 899.994.000 |
| DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|-------------|
| 30 | Meningkatkan Pendapatan | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 139.200.000 |
| 31 | Meningkatkan Pendapatan | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 50.458.000 |
| DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN | | | | | | |
| 32 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN | PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 20.000.000 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| DINAS KETAHANAN PANGAN | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|
| 33 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 |
| 34 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 |
| 35 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|
| 36 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 |
| 37 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|
| 38 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 |
| 39 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 |
| 40 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|
| 41 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 |
| 42 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 |
| 43 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|------------------------------|--|--|--|-------------|
| 44 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 |
| 45 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi | 190.000.000 |
| 46 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi | 190.000.000 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|---|---|-------------|
| 47 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi | 190.000.000 |
| 48 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi | 190.000.000 |
| DINAS KESEHATAN | | | | | | |
| 49 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KESEHATAN | PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | 100.000.000 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---|---|---------------|
| 50 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KESEHATAN | PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 742.387.000 |
| 51 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KESEHATAN | PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 7.794.954.590 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | | | |
| 52 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | PENDAFTARAN PENDUDUK | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | 68.563.200 |
| 53 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | PENCATATAN SIPIL | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil | 43.172.800 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 54 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 42.253.000 |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| 55 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 508.000.000 |
| 56 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 642.000.000 |
| 57 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 4.913.015.000 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|---|---------------|
| 58 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 2.735.000.000 |
| DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | |
| 59 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | PENGLOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 715.310.000 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------|
| 60 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 280.000.000 |
| 61 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 379.567.964 |
| DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI | | | | | | |
| 62 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Pembangunan Jalan | 29.410.321.582 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 63 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Rekonstruksi Jalan | 83.836.371.637 |
| 64 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Rehabilitasi Jalan | 43.851.122.865 |
| 65 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Pembangunan Jembatan | 22.195.766.259 |
| 66 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Rehabilitasi Jembatan | 55.342.000 |
| BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH | | | | | | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

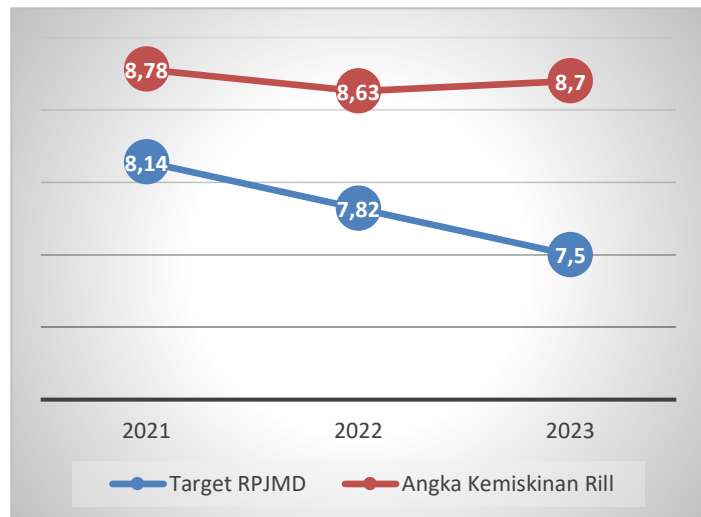
| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------|--|--|------------------------|
| 67 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | 65.751.000 |
| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | |
| 68 | Mengurangi Beban Pengeluaran | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 129.074.263.676 |
| | | | | | | 626.719.250.477 |



BAB 3 HASIL CAPAIAN DAN ANALISIS

3.1 Realisasi Target Penurunan Angka Kemiskinan

Merujuk pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 ditargetkan angka kemiskinan Sulawesi Selatan turun menjadi 7,5%. Namun angka kemiskinan pada tahun 2023 tidak mencapai angka yang ditargetkan



Sumber : BPS, 2023 (diolah)

dikarenakan adanya beberapa factor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan antara lain tidak dibarenginya pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan sector industry.

Secara rata-rata Sulawesi Selatan, jumlah penduduk miskin meningkat mencapai 788.850 orang , naik 6.500 orang jika dibandingkan September 2022 dan naik 11.410 orang jika dibandingkan Maret 2022. Persentasenya pada Maret 2023 tercatat sebesar 8,70 persen, naik 0,04 persen point terhadap September 2022 dan terhadap Maret 2022 juga mengalami kenaikan 0,06 persen poin.

3.1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2017 sampai dengan Maret 2023 berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat disajikan pada Gambar 1 berikut :



Grafik 3.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan, Maret 2017 – Maret 2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Setelah mengalami penurunan persentase penduduk miskin secara berturut-turut pada periode September 2020 (8,99 persen) ke Maret 2021 (8,78 persen) sebesar 0,21 persen dan menurun kembali di September 2021 (8,63 persen) sebesar 0,15 persen, provinsi Sulawesi Selatan kembali mengalami peningkatan sejak periode Maret 2022 sampai dengan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2023 mencapai 788,85 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 6,5 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin juga meningkat sebanyak 11,41 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 8,70 persen, naik 0,04 persen poin terhadap September 2022 dan terhadap Maret 2022 juga mengalami kenaikan 0,06 persen poin.

Adapun keberadaan wilayah perdesaan dan perkotaan di provinsi Sulawesi Selatan cukup mempengaruhi kenaikan tingkat kemiskinan, sebagaimana yang data jumlah penduduk miskin menurut daerah yang disampaikan oleh BPS sebagai berikut :



Grafik 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (Ribu Orang) Menurut Daerah, Maret 2022 – Maret 2023



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Berdasarkan dari daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022 – Maret 2023 jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 2,9 ribu orang, dan di perdesaan naik sebesar 8,5 ribu orang. Adapun persentase kemiskinan di perkotaan turun 5,07 persen menjadi 5,01 persen, sedangkan di perdesaan naik dari 11,53 persen pada Maret 2022 menjadi 11,91 persen pada Maret 2023.

3.1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, Maret 2022 – Maret 2023

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengatasi kedalaman kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Di provinsi Sulawesi Selatan untuk periode September 2022-Maret 2023, **Indeks**



Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 1,566, naik dibandingkan September 2022 yang sebesar 1,498. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami kenaikan dari 0,353 menjadi 0,408. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,712, sedangkan di perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,310. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,163, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,621. Sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2022 – Maret 2023

| Tahun | Perkotaan | Perdesaan | Total |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | | | |
| Maret 2022 | 0,764 | 1,868 | 1,364 |
| September 2022 | 0,761 | 2,131 | 1,498 |
| Maret 2023 | 0,712 | 2,310 | 1,566 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | | | |
| Maret 2022 | 0,179 | 0,432 | 0,316 |
| September 2022 | 0,155 | 0,523 | 0,353 |
| Maret 2023 | 0,163 | 0,621 | 0,408 |

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

3.1.3. Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, Maret 2022 – Maret 2023

Garis kemiskinan adalah suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Berikut disajikan perkembangan



garis kemiskinan pada Maret 2022 sampai dengan Maret 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3.2. Perkembangan Garis Kemiskinan, Maret 2022 – Maret 2023

| Daerah/ Tahun | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|
| | Makanan | Bukan Makanan | Total |
| Perkotaan | | | |
| Maret 2022 | 298.268 | 120.903 | 419.172 |
| September 2022 | 316.179 | 127.538 | 443.717 |
| Maret 2023 | 329.012 | 129.847 | 458.859 |
| Perubahan Maret 2022 – Maret 2023 (%) | 10,31 | 7,40 | 9,47 |
| Perubahan Sep' 2022 – Maret 2023 (%) | 4,06 | 1,81 | 3,41 |
| Perdesaan | | | |
| Maret 2022 | 300.359 | 83.054 | 383.414 |
| September 2022 | 316.911 | 88.302 | 405.213 |
| Maret 2023 | 322.682 | 93.850 | 416.532 |
| Perubahan Maret 2022 – Maret 2023 (%) | 7,43 | 13,00 | 8,64 |
| Perubahan Sep' 2022 – Maret 2023 (%) | 1,82 | 6,28 | 2,79 |
| Total | | | |
| Maret 2022 | 299.433 | 100.322 | 399.755 |
| September 2022 | 316.597 | 106.355 | 422.952 |
| Maret 2023 | 325.418 | 110.607 | 436.025 |
| Perubahan Maret 2022 – Maret 2023 (%) | 8,68 | 10,25 | 9,07 |



| | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Perubahan Sep' 2022 – Maret 2023 (%) | 2,79 | 4,00 | 3,09 |
|--------------------------------------|------|------|------|

Sumber Diolah Data : dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022, September 2022, dan Maret 2023

Garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Maret 2023 adalah sebesar Rp. 436.025,- per kapita per bulan. Dibandingkan dengan bulan September 2022, garis kemiskinan naik sebesar 3,09 persen. Komponen garis kemiskinan (GK), terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Jika memperhatikan pada tabel 2.2 diatas, bisa dilihat bahwasanya peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, dengan besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2023 sebesar 74,63 persen.

Adapun garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2023 adalah sebesar Rp. 2.341.454,- / bulan naik sebesar Rp. 19,83 persen dibanding kondisi September 2022 dengan nilai sebesar Rp. 1.954.454,- / bulan.

Tabel 3.3 Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin,
September 2022 – Maret 2023

| Tahun | Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/ kapita/ bulan) | Rata-rata Anggota Rumah Tangga Miskin | Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/ rumah tangga/ bulan) |
|---|---|---------------------------------------|--|
| September 2022 | 422.952 | 4,62 | |
| Maret 2023 | 436.025 | 5,37 | 2.341.454 |
| Perubahan September 2022 - Maret 2023 (%) | 3,09 | 16,23 | 19,83 |

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2022-Maret 2023 antara lain adalah:



1. Pada periode Maret 2023 terhadap September 2022 terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen secara umum sebesar 1,95 persen. Sementara kenaikan harga komoditi makanan sebesar 5,15 persen di periode yang sama (Sept 22 – Mar 23). Tingkat inflasi Maret secara y-on-y (Maret 2023 terhadap Maret 2022) sebesar 5,86 persen.
2. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,29 persen (y-on-y). Namun pada sektor padat karya seperti Pertanian, Kehutanan, Perikanan; Industri Pengolahan; Jasa Pendidikan; Transportasi; dan Lainnya tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya.
3. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -5,57 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar -19,49 persen.
4. Perkembangan indikator makro selama Bulan Maret 2023 dibandingkan dengan Bulan September 2022 menunjukkan penurunan dengan mengikuti pola musiman yang biasanya berjalan. Indikator makro mengarah pada penurunan luas panen sebesar sekitar 13 ribu hektar diikuti dengan produksi padi yang menurun sebesar 108,1 ribu ton GKG.
5. Persentase setengah pengangguran naik 0,29 persen poin (6,84 persen menjadi 7,13 persen), sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 2,49 persen poin (30,49 persen menjadi 32,98 persen) pada Februari 2023 jika dibandingkan Februari 2022.

3.1.4. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan

Penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus pemerintah sebagaimana amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 yang menginstruksikan kemiskinan ekstrem diturunkan menjadi 0% pada Tahun 2024. Untuk memastikan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem



sebagaimana Arahan Presiden RI, Kemenko PMK memprakarsai Inpres Percepatan Penghapusan Miskin Ekstrem. Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang “Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” ditetapkan pada 8 Juni 2022. Dimana menginstruksikan kepada 22 Kementerian dan 6 Lembaga serta seluruh Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk bekerja sama antar kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah melalui keterpaduan dan sinergi program kegiatan dalam rangka penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

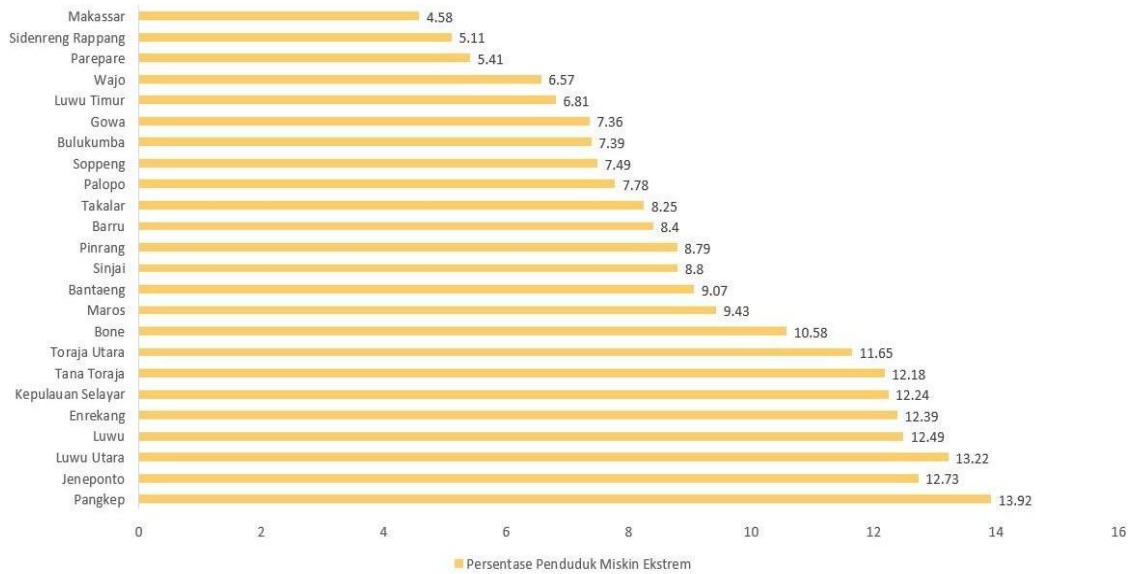
Sebagaimana yang tertuang dalam Inpres No. 4 Tahun 2022, menugaskan Gubernur untuk :

1. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi;
2. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota;
3. Menyusun Program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan Alamat (*by name by address*);
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/ Walikota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan

Sebagaimana yang telah tertuang pada Bab 1, bahwasanya data kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode Maret 2023 sebesar 1,01 persen. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tergambar dalam grafik 2.2 sebagai berikut :

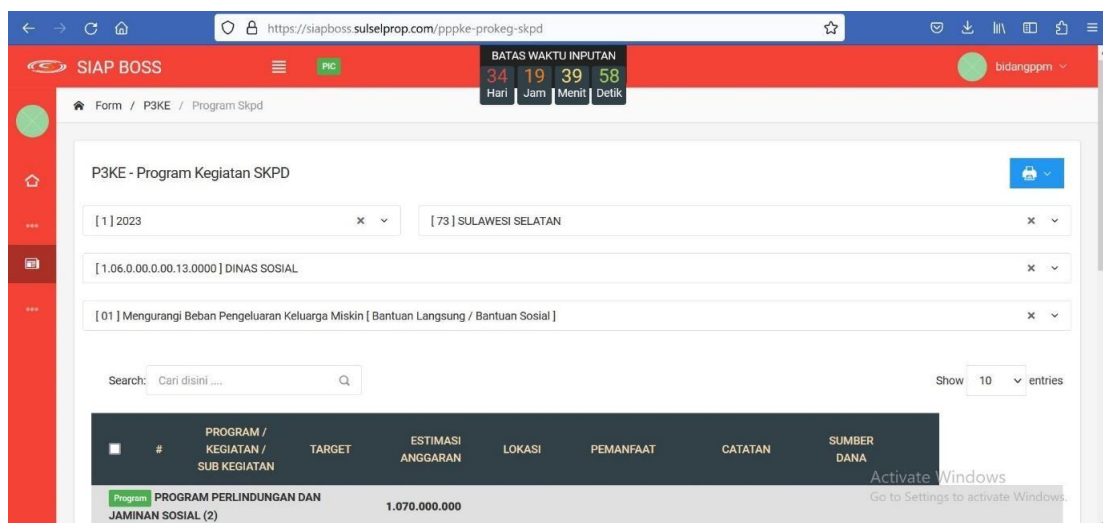


Grafik 3.3 Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota, Maret 2023



Terkait Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanggulangan penghapusan kemiskinan ekstrem, telah disiapkan aplikasi SIAP BOSS sebagai sebuah instrument dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dalam aplikasi tersebut terlihat program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyasar langsung Masyarakat P3KE yang telah diverifikasi dan validasi oleh Kabupaten/ Kota. Adapun gambar aplikasi tersebut sebagai berikut :

Gambar 3.4 Aplikasi SIAP BOSS





3.1.5 Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Provinsi Sulawesi Selatan

Menindaklanjuti surat telegram dari Kemendagri Nomor 460/7460/Bangda bahwa dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, telah terbit Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penerapan Sumber dan Jenis Data dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sumber data tersebut adalah Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana beserta pemitakhiran yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan.

Data pensasaran percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dimaksudkan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana pelaksanaan intervensi kemiskinan untuk memafaatkan data P3KE. Adapun data P3KE terdiri dari :

- a. Data sebaran jumlah individu/ keluarga (tanpa nama dan Alamat) menurut variable terpilih di tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan;
- b. Data individu/ keluarga (tanpa nama dan Alamat) menurut variable terpilih di tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan;
- c. Data individu/ keluarga dengan nama dan Alamat (by name by address) menurut variable terpilih di tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan.

Data sebaran P3KE sebagaimana butir 2a dapat diakses melalui laman situs : p3ke.kemenkopmk.go.id setelah membuat akun pada laman situs tersebut. Data P3KE dimanfaatkan untuk melengkapi Data Terpasu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan untuk meningkatkan akurasi pensasaran program untuk dapat menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program yaitu yang exclusion error. Kemudian sebagai bentuk nyata kolaborasi dan sinergitas tindak lanjut Data P3KE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan kepada Kabupaten/ Kota melalui Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 401/10947/Bappelitbangda yang salah satunya yaitu menyampaikana kepada Tim TKPK Kabupaten/Kota untuk menyampaikan



**(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

laporan hasil verifikasi dan validasi Data P3KE dan DTKS yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati/ Walikota.



Gambar : 3.5. Tim sekretariat TKPK Provinsi Sulawesi Selatan dan peserta Workshop Pengembangan outline petunjuk teknis Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Ekstrem Provinsi Sulawesi Selatan disupport oleh USAID ERAT, Hotel Ibis, Makassar, 29 November 2023.

Adapun sebaran data P3KE Desil 1 sampai dengan Desil 3 di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Jumlah KK Desil 1, Desil 2 dan Desil 3 Berdasarkan data P3KE

| No. | Kab/Kota | Jumlah Keluarga | Jumlah Individu |
|-----|--------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Kep. Selayar | 9543 | 43549 |
| 2 | Bulukumba | 27078 | 116791 |
| 3 | Bantaeng | 16418 | 65711 |
| 4 | Jeneponto | 33468 | 142575 |
| 5 | Takalar | 19914 | 85774 |
| 6 | Gowa | 49917 | 223947 |
| 7 | Sinjai | 14570 | 72743 |
| 8 | Bone | 54555 | 251560 |
| 9 | Maros | 26187 | 115198 |



| | | | |
|----|--------------|-------|--------|
| 10 | Pangkep | 30163 | 129790 |
| 11 | Barru | 11498 | 54594 |
| 12 | Soppeng | 16188 | 69958 |
| 13 | Wajo | 23227 | 102556 |
| 14 | Sidrap | 14176 | 66495 |
| 15 | Pinrang | 25470 | 119381 |
| 16 | Enrekang | 13484 | 71334 |
| 17 | Luwu | 21781 | 113735 |
| 18 | Tana Toraja | 17369 | 96611 |
| 19 | Luwu Utara | 28982 | 131554 |
| 20 | Luwu Timur | 15711 | 76984 |
| 21 | Toraja Utara | 14133 | 83991 |
| 22 | Makassar | 47046 | 228596 |
| 23 | Pare pare | 5022 | 25908 |
| 24 | Palopo | 11152 | 53900 |

3.2 Program Penanggulangan Kemiskinan

Terdapat empat prinsip utama dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif. Pertama, memperbaiki dan mengembangkan system perlindungan social bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Cakupan perlindungan social tersebut meliputi bantuan social dan jaminan social. Bantuan sosial diberikan kepada kelompok sangat rentan diantaranya penduduk dengan status kemiskinan absolut, peyandang disabilitas, lanjut usia, serta masyarakat di daerah terpencil. Sementara jaminan social diselenggarakan untuk membantu individu dan masyarakat dalam menghadapi guncangan dalam kehidupan. Misalnya karena sakit, kematian, dari anggota keluarga, kehilangan pekerjaan bencana dan lainnya.

Kedua, meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Sesuai pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan merupakan jenis pelayanan dasar diklasifikasi menjadi enam urusan yakni Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat



dan Kawasan permukiman; ketenteraman; ketertiban umum; dan perlindungan masyarakat; dan social. Akses terhadap seluruh pelayanan dasar tersebut akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakatFeha miskin, sekaligus mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital).

Ketiga, memperdayakan penduduk miskin dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Upaya ini penting untuk dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali kedalam kemiskinan. Menempatkan penduduk miskin sebagai subjek pembangunan sangat penting dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemberdayaan masyarakat juga perlu diselenggarakan dengan mempertimbangkan karakteristik local pada masing-masing wilayah.

Prinsip utama yang keempat dalam penanggulangan kemiskinan yakni pembangunan yang inklusif. Pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang melibatkan sekaligus memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Salah satu indikatornya yakni perekonomian yang tumbuh secara dinamis dan berimplikasi pada perluasan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya hal tersebut melahirkan *multiplier effect* pada peningkatan pendapatan penduduk, peningkatan taraf hidup dan pengurangan jumlah penduduk miskin serta kesejahteraan.

Seluruh strategi dalam penanggulangan kemiskinan harus mengacu kepada keempat prinsip utama tersebut. Secara nasional, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan mencakup empat strategi yakni : (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil dan (4) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan belanja daerah untuk penanggulangan kemiskinan diklasifikasi menjadi 4 (empat) kluster. Pertama Kluster 1 yaitu untuk



kelompok program bantuan social terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Kedua, klaster 2 yaitu kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Ketiga, klaster 3 yang mencakup kelompok program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Serta, klaster 4 yakni program-program lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Sejalan dengan klasifikasi program penanggulangan kemiskinan tersebut, seluruh program-program yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dikelompokkan dengan mengacu pada kategori yang serupa. Uraian program dimaksud antara lain : Klaster 1 meliputi program seputar jaminan pemeliharaan kesehatan daerah, penataan administrasi kependudukan, rehabilitasi sosial baik yang berupa pelayanan di dalam maupun luar panti social, hingga penyelenggaraan bantuan social dan subsidi pangan. Klaster 2 mencakup program-program pelatihan bagi calon pewirausaha, nelayan, tenaga kerja serta pemberdayaan masyarakat. Klaster 3 program-program pelatihan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha diselenggarakan melalui program pembinaan kewirausahaan dan pengembangan UKM, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan dan pengembangan industry (termasuk disektor pariwisata). Klaster 4 terdiri atas program-program lain yang bersifat mendukung dalam penyelenggaraan upaya penanggulangan kemiskinan. Detail terkait item-item program yang terdapat pada masing-masing klaster dapat dilihat pada Gambar 3.5

Gambar 3.6 Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan pada APBD
provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023



**(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

| Klaster 1 | | Klaster 2 | |
|------------------|---|------------------|---|
| 1 | Program Kesejahteraan Rakyat | 1 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja |
| 2 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 2 | Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan |
| 3 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 3 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap |
| 4 | Program Pengelolaan Pendidikan | 4 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya |
| 5 | Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan. Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat | 5 | Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian |
| 6 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | |
| 7 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | | |
| Klaster 3 | | Klaster 4 | |
| 1 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 1 | Program Pengembangan Perumahan |
| 2 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | 2 | Program Kawasan Permukiman |
| 3 | Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | 3 | Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) |
| 4 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 4 | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum |
| | | 5 | Program Penataan Bangunan Gedung |
| | | 6 | Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya |
| | | 7 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| | | 8 | program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | 9 | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan |
| | | 10 | Program Penyelenggaraan Jalan |
| | | 11 | Penanganan Kerawanan Pangan |
| | | 12 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |
| | | 13 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri |
| | | 14 | Program Pengelolaan keuangan Daerah |
| | | 15 | program Pengelolaan Sumber daya Air |
| | | 16 | Program Pencatatan Sipil |
| | | 17 | Program Pendaftaran penduduk |
| | | 18 | Program pengelolaan Hutan |
| | | 19 | Program Kesejahteraan Rakyat |



Alokasi belanja daerah untuk penanggulangan kemiskinan telah diulas di Bab 2. Alokasi belanja untuk masing-masing program pada setiap kluster disajikan pada Tabel 2.1 Pada table tersebut, besaran alokasi belanja per program dihitung dari jumlah kegiatan pada masing-masing program yang mendukung pencapaian tujuan setiap kluster penanggulangan kemiskinan.

Tabel. 3.5 Alokasi Belanja untuk Program Penanggulangan Kemiskinan per Kluster, Tahun 2023

| Kluster | Program | Anggaran Perubahan | Realisasi | Persentase (%) |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1.550.000.000 | 1.469.604.500 | 95% |
| 1 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 8.637.341.590 | 7.302.811.125 | 85% |
| 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | 3.309.096.940 | 2.863.604.975 | 87% |
| 1 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 1.080.000.000 | 1.076.977.112 | 100% |
| 1 | Program penanganan Kerawanan Pangan | 760.000.000 | 759.280.883 | 100% |
| Sub Total Kluster 1 | | 15.336.438.530 | 13.472.278.595 | 88% |
| 2 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja | 1.689.998.800 | 1.652.889.000 | 98% |
| 2 | Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | 172.000.000 | 172.000.000 | 100% |
| 2 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 4.913.015.000 | 695.110.000 | 14% |
| 2 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 2.735.000.000 | 848.125.000 | 31% |
| 2 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 139.200.000 | 114.121.374 | 82% |
| Sub Total Kluster 2 | | 9.649.213.800 | 1.829.356.374 | 19% |
| 3 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | 1.150.000.000 | 531.790.000 | 46% |
| 3 | Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | 50.458.000 | 50.458.000 | 100% |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|------------|
| 3 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 28.250.000.000 | 27.990.253.750 | 99% |
| Sub Total Klaster 3 | | 29.450.458.000 | 28.572.501.750 | 97% |
| 4 | Program Pengembangan Perumahan | 511.163.000 | - | 0% |
| 4 | Program Kawasan Permukiman | 194.857.000 | 194.857.000 | 100% |
| 4 | Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | 6.449.134.064 | 5.159.307.249 | 80% |
| 4 | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum | 20.081.396.800 | 8.825.000 | 0% |
| 4 | Program Penataan Bangunan Gedung | 61.358.599.739 | 34.027.094.827 | 55% |
| 4 | Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya | 87.140.349.939 | 16.273.467.812 | 19% |
| 4 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 42.253.000 | 38.878.200 | 92% |
| 4 | program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 20.000.000 | 20.000.000 | 100% |
| 4 | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | 1.374.877.964 | 1.129.849.634 | 82% |
| 4 | Program Penyelenggaraan Jalan | 179.348.924.343 | 164.179.322.047 | 92% |
| 4 | Penanganan Kerawanan Pangan | 760.000.000 | 759.280.883 | 100% |
| 4 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 4.662.087.600 | 3.158.937.600 | 68% |
| 4 | Program Pengelolaan keuangan Daerah | 129.074.263.676 | 113.057.721.750 | 88% |
| 4 | program Pengelolaan Sumber daya Air | 80.847.752.022 | 39.924.258.844 | 49% |
| 4 | Program Pencatatan Sipil | 43.172.800 | 43.102.200 | 100% |
| 4 | Program Pendaftaran penduduk | 68.563.200 | 68.460.056 | 100% |
| 4 | Program pengelolaan Hutan | 899.994.000 | 799.992.000 | 89% |
| 4 | Program Kesejahteraan Rakyat | 65.751.000 | 64.305.049 | 98% |
| Sub Total Klaster 3 | | 572.943.140.147 | 378.907.660.151 | 66% |
| Total Keseluruhan (Klaster 1 s/d 4) | | 627.379.250.477 | 422.781.796.870 | 67% |



3.2.1 Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Dalam rangka menindaklanjuti upaya penanggulangan kemiskinan maka dilakukan penyusunan program – program kegiatan sebagai pendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, dalam pasal 18 menyatakan bahwa program – program penanggulangan kemiskinan terdiri atas program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga dan individu, program pemberdayaan Masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil serta program lainnya yang mendukung secara langsung atau tidak langsung dalam penanggulangan kemiskinan.



Program-program penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| No | Tujuan Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|
| DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan Pendapatan | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | 1.689.998.800 | 1.652.889.000 |
| DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA | | | | | | | |
| 2 | Meningkatkan Pendapatan | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan | 28.250.000.000 | 27.990.253.750 |
| DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | | | | | | | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|--|---|----------------|----------------|
| 3 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan jaringan Irigasi Permukaan | 18.305.666.051 | 14.824.680.628 |
| 4 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi jaringan Irigasi Permukaan | 44.797.028.771 | 12.581.465.814 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|----------------|----------------|
| 5 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Bendung Irigasi | 17.745.057.200 | 12.518.112.402 |
| 6 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan | 20.081.396.800 | 8.825.000 |
| 7 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 61.358.599.739 | 34.027.094.827 |



**(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|----------------|----------------|
| 8 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Penataan Bangunan dan Lingkungan | 87.140.349.939 | 16.273.467.812 |
| DINAS SOSIAL | | | | | | | |
| 9 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS SOSIAL | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 480.000.000 | 415.604.500 |
| 10 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS SOSIAL | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 720.000.000 | 708.300.000 |
| 11 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS SOSIAL | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 350.000.000 | 345.700.000 |
| DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | | | | | |
| 12 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 298.024.000 | - |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|-------------|-------------|
| 13 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 213.139.000 | - |
| 14 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | KAWASAN PERMUKIMAN | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 194.857.000 | 194.857.000 |
| 15 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 924.828.357 | 739.862.685 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---------------------------------------|---|-------------|-------------|
| 16 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 924.828.357 | 739.862.685 |
| 17 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 924.828.357 | 739.862.685 |
| 18 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 924.828.357 | 739.862.685 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|-------------|-------------|
| 19 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 899.936.688 | 719.949.351 |
| 20 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 924.941.974 | 739.953.579 |
| 21 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 924.941.974 | 739.953.579 |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | | | |



**(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|--|--|---------------|---------------|
| 22 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 4.662.087.600 | 3.158.937.600 |
| DINAS PENDIDIKAN | | | | | | | |
| 23 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pengadaan perlengkapan peserta didik, | 999.900.000 | 987.567.900 |
| 24 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pembangunan USB | 2.309.196.940 | 1.876.037.075 |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | |
| 25 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 46.400.000 | 46.400.000 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|
| 26 | Meningkatkan Pendapatan | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 25.600.000 | 25.600.000 |
| 27 | Meningkatkan Pendapatan | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 100.000.000 | 100.000.000 |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | |



**(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|-------------|-------------|
| 28 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 100.000.000 | - |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | | | | | | | |
| 29 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | 899.994.000 | 799.992.000 |
| DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | |
| 30 | Meningkatkan Pendapatan | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 139.200.000 | 114.121.374 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|------------|------------|
| 31 | Meningkatkan Pendapatan | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 50.458.000 | 50.458.000 |
| DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN | | | | | | | |
| 32 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN | PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 20.000.000 | 20.000.000 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN | | | | | | | |
| 33 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 | 89.630.654 |



**(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------|---|---|---|------------|------------|
| 34 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 | 89.669.504 |
| 35 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 | 89.706.000 |
| 36 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 | 89.734.000 |
| 37 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 | 89.742.764 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------|---|---|---|------------|------------|
| 38 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 | 89.752.704 |
| 39 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 | 89.818.799 |
| 40 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 | 89.837.454 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|------------------------------|--|---|---|------------|------------|
| 41 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 | 89.742.764 |
| 42 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 | 89.652.607 |
| 43 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 | 89.707.848 |



**(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|------------------------------|--|---|---|-------------|-------------|
| 44 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 90.000.000 | 89.982.014 |
| 45 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi | 190.000.000 | 189.857.129 |
| 46 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi | 190.000.000 | 189.717.333 |
| 47 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi | 190.000.000 | 189.737.237 |



**(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|
| 48 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KETAHANAN PANGAN | PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi | 190.000.000 | 189.969.184 |
| DINAS KESEHATAN | | | | | | | |
| 49 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KESEHATAN | PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 50 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KESEHATAN | PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 742.387.000 | 678.673.770 |
| 51 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KESEHATAN | PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 7.794.954.590 | 6.524.137.355 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | | | | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|-------------|-------------|
| 52 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | PENDAFTARAN PENDUDUK | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | 68.563.200 | 68.460.056 |
| 53 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | PENCATATAN SIPIL | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil | 43.172.800 | 43.102.200 |
| 54 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 42.253.000 | 38.878.200 |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | |
| 55 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | 508.000.000 | 508.000.000 |
| 56 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 642.000.000 | 23.790.000 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------|-------------|
| 57 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 4.913.015.000 | 695.110.000 |
| 58 | Mengurangi Beban Pengeluaran | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 2.735.000.000 | 848.125.000 |
| DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | | |
| 59 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 715.310.000 | 609.579.920 |
| 60 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 280.000.000 | 142.218.750 |



**(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------|----------------|
| 61 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | PENGLOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 379.567.964 | 378.050.964 |
| DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI | | | | | | | |
| 62 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Pembangunan Jalan | 29.410.321.582 | 29.408.271.932 |
| 63 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Rekonstruksi Jalan | 83.836.371.637 | 72.557.194.741 |
| 64 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Rehabilitasi Jalan | 43.851.122.865 | 40.066.415.439 |
| 65 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Pembangunan Jembatan | 22.195.766.259 | 22.102.188.735 |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|
| 66 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Rehabilitasi Jembatan | 55.342.000 | 45.251.200 |
| BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH | | | | | | | |
| 67 | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | 65.751.000 | 64.305.049 |
| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | |
| 68 | Mengurangi Beban Pengeluaran | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 129.074.263.676 | 113.057.721.750 |
| | | | | | | 625.029.251.677 | 422.022.515.987 |



3.3 Realisasi Anggaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2023 telah menganggarkan sebesar Rp. 626.719.250.477,- dengan realisasi sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 422.022.515.987,-. Atau sebesar 67,34%. Adapun perbandingan alokasi anggaran dan realisasinya dapat dilihat dalam grafik 2.3 berikut :



Grafik 3.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran P3KE 2023



3.4 Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, di antaranya melalui :

- Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar; bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler, dan Bantuan Beras;
- bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
- subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji; dan pemberian Bantuan Iuran Jaminan sosial Kesehatan Nasional (JKN).
- Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui:
 - peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sektor); peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu prakerja, program vokasi;
 - peningkatan Kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha; dan peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).



3.5 Koordinasi Program dan Kegiatan penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Sebagai upaya pelaksanaan Program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Selatan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang di dalam Kepmendagri No.53 tahun 2020 tentang Tata kerja dan Penyelerasian kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Salah satu fungsi dan tugas tim TKPK Provinsi adalah melakukan koordinasi, Pengawasan /monitoring pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dalam lingkup Provinsi dan sinergitas dengan tim TKPK Kabupaten /Kota dan juga dengan tim TNP2K di level nasional. Di dalam laporan LP2KD 2023 ini akan disajikan beberapa kegiatan koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi selama tahun 2023.

3.5.1 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tahun 2023.

Adapun kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh tim TKPK Provinsi selama tahun 2023 antara lain dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi berupa rapat-rapat sekretariat TKPK Provinsi antara lain :
 - a. Pelaksanaan Zoom Meeting dengan pemerintah kabupaten yang belum menyampaikan hasil verval P3KE.
 1. Pelaksanaan zoom meeting tanggal 6 November 2023. Pukul 10.00 s.d selesai. Peserta terdiri dari 8 kabupaten , Programmer siap Boss, USAID ERAT, Perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulsel.
 2. Tujuan dari pelaksanaan zoom meeting; untuk mengetahui perkembangan hasil verval P3KE di masing-masing kabupaten dan



kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P3KE.

3. Dalam kesempatan tersebut ibu Sekban Bappelitbangda provinsi Sulsel menyampaikan beberapa hal terkait dengan upaya yang harus segera diselesaikan proses pelaksanaan verval P3KE. Hasil verval P3KE akan seluruh wilayah Sulawesi Selatan menjadi point' penting untuk dilaporkan ke pemerintah pusat dan sebagai salah satu indikator kinerja evaluasi PJ gubernur sejak awal September hingga bulan Desember 2023.
4. Kami di sektariat TKPK provinsi mengharapkan kegiatan verval di masing-masing kabupaten dilakukan secara tepat dan tepat, sehingga hasil data angka KE dari Kemenko PMK akan menurun secara signifikan seperti yang dilaporkan oleh beberapa kabupaten antara lain; Jeneponto, Gowa, Barru, Maros, Luwu Timur dan lainnya. Melalui
5. Selanjutnya beberapa daerah yang sedang berproses verifikasi dan validasi data P3KE melaporkan perkembangan dan sekaligus kendala- kendala yang dihadapi; antara lain; Luwu Utara sudah selesai verval dan telah .mengirimkan hasil verval dan SK Bupati. Luwu Timur sementara berproses, masih ada desa yang belum selesai. Hasil sementara desil 1. Dari data P3KE awal 4559 setelah di verval menjadi 2.890. Sementara desil 2 dan 3 masih proses verval akan segera di selesaikan dan penetapan SK Bupati.
6. Untuk kabupaten Tana Toraja masih melakukan proses verval, ada yang sudah selesai di dua Kecamatan dan beberapa Lembang yang jauh dan sulit signal internet. Sementara proses perhitungan belum bisa dilakukan menunggu hasil keseluruhan verval.
7. Sementara kabupaten Wajo sudah selesai melakukan verval dan penetapan SK Bupati dan telah dikirimkan ke tim tkpk provinsi. Koordinasi antar stakeholder sudah dilakukan untuk tagging anggaran kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
8. Kabupaten Barru juga telah menyampaikan SK Bupati penetapan



- P3KE, namun belum melaporkan hasil verval di lapangan, akan segera dikirim hasil. Data P3KE hasil verval desil 1-3 awalnya 54.594 jiwa setelah diverval menurun menjadi 37.508 jiwa penurunan yang signifikan.
9. Koordinasi dengan OPD dan telah melakukan tagging anggaran dalam RKA tahun 2024; telah mengacu pada SK Bupati hasil penetapan P3KE.
 10. Kabupaten Bulukumba sementara berproses, sudah 50 persen, data keseluruhan belum bisa dilaporkan, namun data sementara dapat dilaporkan :
 - a. DTKS ; 172.149; P3KE; 170..869, sementara data irisan data P3KE dan DTKS sebesar : 68.101. Data P3KE yang tidak layak dalam DTKS sebesar ; 2.800.
 - b. NIK tidak valid sebesar : 5.760.
 - c. Hasil verval akan seluruhnya ditetapkan melalui SK Bupati dan dilaporkan ke TKPK Provinsi Sulsel.
 11. Kabupaten Pinrang sementara sedang berproses, perkembangan sekitar 20 persen dan akan segera di selesaikan dan ditetapkan melalui SK Bupati.
 12. Beberapa kabupaten lainnya juga sedang berproses seperti Sinjai melaporkan telah 50 persen proses verval dan akan segera diselesaikan.
 13. Diakhir pertemuan ibu Sekban mengucapkan terimakasih kepada para peserta kabupaten kota atas partisipasi aktifnya dalam kegiatan zoom meeting ini dan apresiasinya kepada USAID ERAT yang telah mensupport terselenggaranya zoom meeting. Bu Sekban menekankan kembali bahwa kabupaten segera menyelesaikan proses verval, meskipun terdapat berbagai kendala yang dihadapi, yang tentunya berbeda dengan kendala yang dihadapi TKPK provinsi.
 14. Kegiatan lanjutan dari zoom meeting ini adalah kegiatan sosialisasi

dan kunjungan lapangan , catatan yang sudah terjadwal antara lain; kabupaten Luwu Utara tanggal 8-9 November 2023; kabupaten Luwu Timur berlangsung pada 14-15 November 2023; Tana Toraja tanggal 21-22 November 2024; sementara kabupaten Wajo dilaksanakan pada tanggal 30 November-1 Desember 2023.

15. Harapan kami pemerintah kabupaten membantu fasilitasi kegiatan sosialisasi aplikasi siap boss dan mengundang perwakilan operator P3KE desa, sehingga mereka dapat melakukan proses verval dengan baik dalam proses percepatan replikasi siap boss ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan dapat berjalan lancar. Tentunya dengan hasil tersebut akan mempercepat pelaksanaan P3KE di seluruh wilayah provinsi, dan berdampak pada pencapaian target penurunan angka kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada tahun 2024 sesuai amanat inpres no 4 tahun 2022 dapat terwujud



Gambar 3.7. Zoom Meeting dengan Usaid Erat dan TKPK Kabupaten wilayah kerja USAIDERAT pelaksanaan Verval P3KE, 03 November 2023.

2. Hasil pelaksanaan rapat koordinasi penginputan data Program dan kegiatan yang berkontribusi pada kemiskinan dan kemiskinan ekstrem lingkup OPD provinsi Sulsel.
 - a. Pelaksanaan rapat ,hari Jum'at tanggal 03 November 2023. Pukul 1.30 sampai selesai.bertempat di ruang rapat Mamminasata lantai 4



Bappelitbangda Provinsi Sulsel.

- b. Peserta pertemuan dari 22 OPD yang berkomitmen dan mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan. Menghadirkan narasumber, pak Azis dan Kusnadi, sebagai programmer siap boss.
- c. Acara dibuka oleh ibu Sekretaris Bappelitbangda dan dipandu oleh perencana madya Bappelitbangda Provinsi Sulsel. Dalam kesempatan tersebut ibu Sekban memberi pengarahannya, bahwa kegiatan penginputan data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tersebut sebagai lanjutan dari hasil rekomendasi dengan BPKP, agar seluruh program kegiatan dan sub kegiatan pengampu kemiskinan dapat direkam secara baik dan alokasi anggaran dapat efektif menyentuh secara langsung kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Melalui ke tiga strategy penghapusan kemiskinan ekstrem; 1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; 2. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan startegy 3. Mengurangi wilayah kantong kantong kemiskinan.
- d. Dalam pengarahannya ibu Sekban juga memberi penjelasan secara teknis startegy skema pemberian bantuan kepada masyarakat miskin ekstrem agar alokasi anggaran yang digelontorkan kepada masyarakat miskin dapat tepat sasaran. Skema pertama pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dimasukkan ke kepada kelompok yang sudah eksis.
- e. Kedua membentuk kelompok usaha, atau kelompok tani, atau kelompok baru tertentu yang di dalamnya memperkerjakan masyarakat miskin: misalnya buruh tani, buruh nelayan, dan lainnya; skema ke tiga ketua kelompok membuat surat pernyataan bahwa sebagai produk hasil bantuan berupa hasil tanaman atau hasil laut akan dibagikan kepada masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan dan skema tersebut dapat diklaim sebagai startegy pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.



- f. Dalam kesempatan tersebut para peserta dari OPD juga mempertahankan, bahwa ada beberapa OPD yang menganggarkan dana untuk kemiskinan, namun tidak menyentuh secara langsung kepada masyarakat miskin; contoh dinas Kominfo, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pemberdayaan masyarakat dan dinas lainnya. Dalam kesempatan tersebut pak Azis programmer siap boss menjelaskan, bahwa di dalam aplikasi siap boss, kasus - kasus semacam telah dikelompokkan ke dalam startegy 3. Mengurangi kantung-kantung kemiskinan.
- g. Para peserta OPD yang hadir dalam rapat tersebut telah di buat username dan password dan selanjutnya dilatih cara login dan menginput data ke dalam aplikasi siap boss.
- h. Masih ada beberapa OPD yang belum sempat membuat username dan password. karena ketidakhadiran pada rapat tersebut. Antara lain; dinas kesehatan, dinas pendidikan, perhubungan, peternakan dan kesehatan hewan, lingkungan hidup dan kehutanan, SDA cipta karya dan tata ruang, perindag dan biro kesra.
- i. Kepada operator OPD yang telah memiliki username dan melakukan login agar memastikan bahwa data kegiatan dan sub kegiatan yang diinput sudah sesuai dan segera melengkapi data ke dalam aplikasi siap boss sambil menunggu perbaikan sistem aplikasi untuk melengkapi seluruh skema pengelolaan data dapat dimasukkan ke dalam aplikasi siap boss.
- j. Seluruh OPD agar segera menginput data program dan kegiatan dan sub kegiatan ke dalam aplikasi siap boss.
- k. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan dari pertemuan penginputan program dan kegiatan sinergitas penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem lingkup pemerintah provinsi Sulsel.



Gambar 3.8 Rapat Tagging Anggaran Kemiskinan Ruang Rapat Bappelitbangda, 03 November 2023.

3. Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023

Pelaksanaan hari Senin, Tgl 30 Januari 2023, Pukul : 09.00 – Selesai. Tempat kegiatan : Ruang Rapat Mamminasata Lantai 4 Bappelitbangda Prov. Sulsel. Peserta dari OPD Pengampu Program Kemiskinan dan 5 Kabupaten lokus Kemiskinan Ekstrem yaitu ; Luwu Utara, Jeneponto, Bone, dan Pangkep.

Hasil Pertemuan :

1. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan pertemuan tersebut sebagai tindaklanjut dari amanah Inpres No.4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem dan juga intruksi Bapak Gubernur Sulsel, pertemuan ini sebagai wujud dari kolaborasi antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya pencapaian target penghapusan/penurunan kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0 persen pada Tahun 2024.
2. Dalam upaya mempertajam pensasaran program dan kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Pemerintah Pusat telah menyiapkan data P3KE dan DTKS. Kedua basis data tersebut telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan OPD terkait. Oleh karena itu, kepala Bappelitbangda dan



Prof. Darmawan memberi penekanan kepada OPD dan Pemerintah Kabupaten lokus kemiskinan ekstrem untuk memanfaatkan rekonfirmasi/sinkronisasi kedua data tersebut sebagai acuan atau referensi dalam mengintervensi lokasi-lokasi Kabupaten, Desa-desa yang menjadi lokus kemiskinan ekstrem, sehingga program dan kegiatan percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan efektif dan efisien.

3. Kepala Bappelitbangda, selaku sekretaris TKPK Provinsi Sulsel menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi untuk memberikan bantuan keuangan khusus pada lima kabupaten lokus kemiskinan ekstrem, sebagai stimulus dan supporting Pemerintah Provinsi dalam penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Kabupaten Luwu Utara

- a. Yang perlu disepakati terkait penghapusan yaitu apakah di data P3KE yang dimaksud kemiskinan ekstrem hanya di desil 1 namun di Kemenko PMK bisa juga mengintervensi desil 2 sampai 4 karna data dari Kemenko PMK masih ada sekitar 4 sampai 6 desa belum masuk datanya di bawah 50% hasil verifikasi desa, jadi pengertian menghapus ini apakah hanya data di P3KE yang mau diselesaikan karena fakta dilapangan ada juga orang miskin ekstrem yang tidak termasuk dalam P3KE, sehingga kemarin dibuka ruang untuk bisa memasukkan nama baru diluar data P3KE, namun sementara target yang di SK Bupati apakah P3KE atau bisa juga yang baru dimasukkan, dan terkait hal tersebut kita mengacu kelembaga mana yang mengeluarkan data capaian ini, apakah yang dirilis BPS atau P3KE.
- b. Ada tumpang tindih karena OPD Provinsi mengintervensi, OPD Kabupaten mengintervensi dan Desa juga mengintervensi, jadi saran kami kalau bisa Provinsi menunggu dulu data hasil verifikasi desa dari kabupaten, kemudian diserahkan ke OPD provinsi, kemudian hasil nama-nama dari OPD provinsi masuk ke TKPK provinsi, baru disampaikan ke kabupaten sehingga sisa nama yang diintervensi provinsi itu yang diintervensi OPD kabupaten.



Kabupaten Jeneponto

- a. Berdasarkan data P3KE yang didapatkan apakah ini by name by address, baik individu maupun keluarga yang datang dari P3KE ini merupakan data by name by address kemiskinan ekstrem ataukah berdasarkan data sinkronisasi data BPS bahwa khusus Kabupaten Jeneponto kemiskinan ekstremnya 7%, kalau dilihat dari data P3KE untuk individu ada 61.287 di desil satu atau sekitar 13.250 rumah tangga, itulah data kemiskinan ekstremnya tapi siapa by name by address yang masuk dikemiskinan ekstrem tidak bisa ditentukan dari data ini tapi harus ditelusuri lebih dalam berkaitan dengan variable-variabel pembentuk keluarga yang masuk di desil satu sehingga harus sama-sama persepsikan kalau sepakat dikatakan data P3KE sebagai basis data sasaran untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem tapi tidak bisa diidentikkan sebagai jumlah data kemiskinan ekstrem di kabupaten karena akan berbeda datanya.
- b. Khusus untuk kabupaten akan dilakukan percepatan penghapusan ekstrem di wilayah dengan mengacu pada penetapan data sasaran ke keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa dengan dibuktikan berita acara musyawarah desa sampai ditingkat kelurahan dan ditetapkan dalam keputusan Bupati sebagai data sasaran kemiskinan ekstrem sebagai rujukan untuk keterkaitan dengan penajaman program kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai penghapus kemiskinan ekstrem.
- c. Berdasarkan hasil koordinasi Dinas ESDM Provinsi, terkait program bantuan pasang baru listrik diharapkan yang jadi rujukan data P3KE, jumlah keluarga di desil satu dan desil tiga yang tidak memiliki listrik ada sekitar 400 lebih tapi setelah dilakukan verifikasi ternyata masih banyak yang membutuhkan, ada rumah tangga miskin yang tidak punya meteran tapi tidak ada dalam data P3KE, sehingga dianggap saat pendataan P3KE belum sepenuhnya melakukan validasi data untuk seluruh keluarga dan rumah tangga, diminta memasukkan rumah tangga tersebut yang tidak ada dalam data P3KE tapi benar dinyatakan oleh Kepala desa dan kelurahan bahwa dia adalah rumah tangga miskin berdasarkan perbandingan kesejahteraan di desa dan



kelurahan masing-masing.

Kabupaten Bone

- a. Dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem harus berdasar inpres nomor 4 tahun 2022, Kepmenko PMK n.p.mor 25 tahun 2022, Kepmenko PMK nomor 30 tahun 2022 tentang panduan umum P3KE, Kabupaten Bone telah mempunyai akun yang didapat dari Kemenko PMK dari 28 variabel yang diintervensi kabupaten Bone sudah tahu kecamatan mana yang merah, abu-abu, kuning dan hijau, dari data P3KE yang didapat dari kementerian tidak bisa langsung diintervensi by name by address karena ada yang sudah mampu, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah berpindah tempat, ada yang tidak punya nik dan ada yang nik nya dobel bahkan ada yang satu nik dipakai dua orang sesuai dengan Kepmenko PMK nomor 30 tahun 2022.
- b. Kepala desa punya wewenang untuk memverifikasi data-data yang ada di P3KE dalam bentuk musyawarah desa kemudian dibuat berita acara yang mana akan diintervensi dan dibuat dalam bentuk SK kemudian Kepala desa menyeteror ke tim TKPKD Kabupaten untuk dijadikan dasar yang akan diintervensi, SK Kepala desa yang sudah di SK kan dijadikan dasar yang akan di SK kan oleh Bupati Bone untuk diintervensi secara resmi sehingga data yang jumlahnya 66.000 setelah dikeluarkan semua ternyata kemiskinan ekstrem kabupaten bone hanya 7.000 lebih dari 372 desa dan kelurahan, jadi jumlah yang akan diintervensi bone adalah 7.962 orang desil satu setelah dilihat dari 28 variabel yang ada di website Kepmenko PMK ternyata 5 Kecamatan yang parah, dan itulah yang harus diintervensi sehingga tahun 2024 jadi nol dan telah disampaikan ke OPD.

Kabupaten Pangkep

- a. Berdasarkan desil satu jumlah KK 14.404, individu 60.266 jadi data total P3KE sampai desil tiga ada 30.000 KK, kurang lebih dari total 169.790, gimana kita menyambungkan antara data P3KE yang berdasarkan sensus dengan data prediksi BPS, berdasarkan prediksi BPS, pangkep jumlah



- ekstremnya 11.900, kalau desil satu ada 60.000 jadi yang harus dicari 11.900 yang harus dilewati verifikasi-verifikasi di desa dan kelurahan untuk ditetapkan di kabupaten, datanya belum ada tapi sudah diperiksa oleh BPK karena akhir tahun 2022 baru muncul tapi kalau kebijakan sudah dimunculkan.
- b. Terkait dengan verifikasi desa dan kelurahan, adakah juknis yang bisa dijadikan patokan.
 - c. Kalau menyesuaikan dengan PMK terkait dana desa, intervensi dana desa BLT diprioritaskan pada desil satu, jika tidak terdapat di desil satu maka cari di desil dua, jika tidak ada cari di desil tiga dan bila tidak ada di desil satu, dua dan tiga maka carilah orangnya, dimana di SIPD difasilitasi jika ingin dikancing kinerja terkait dengan desil itu.
 - d. Dalam satu kabupaten harus ada satu orang yang punya sudah registrasi di link sekertariat P3KE, prosedurnya Panjang, silahkan lihat di kecamatan mana yang mau diintervensi agar di link dulu karena disitu akan kelihatan kecamatan dan desa mana yang berwarna merah.
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada Hari Selasa, tanggal 4 April 2023. Bertempat di Kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.

Pertemuan dihadiri Oleh OPD yang mengampu Program Penanggulangan Kemiskinan, perwakilan Bidang-Bidang Bappelitbangda , dan Staf Bidang PPM Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan :

Rapat dipimpin oleh pak Ilyas. Menyampaikan secara umum tujuan pertemuan untuk membahas hasil Reviu tim BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tentang Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya Ibu Sermila Maladevi (Bu Atte) tenaga Pendamping TKPK Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan Detail hasil rekomendasi dari Reviu Tim BPKP yang terdiri dari empat butir pokok Review tentang P3KE antara lain:



Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh BPKP antara lain.

- Perlu revisi dokumen RPKD/RAT yang lebih rinci dan terukur terkait indikator kinerja sesuai dengan tiga strategy penanggulangan kemiskinan yaitu ; pengurangan beban biaya pengeluaran masyarakat miskin; peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi kantong2 kemiskinan.
- Untuk mempertajam program dan kegiatan yang melekat pada OPD agar setiap kegiatan yang diusulkan oleh OPD menyertakan TOR/ proposal agar dapat lebih rinci menyertakan indikator kegiatan yang langsung menyangkut kepentingan masyarakat miskin.
- Pemanfaatan paduserasi data DTKS dan P3KE sebagai bahan acuan untuk penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing OPD. Di wilayah Kabupaten/Kota dan di level Desa Paduserasi Data DTKS dan P3KE dilakukan oleh Dukcapil dan selanjutnya diferivikasi dilevel desa, selanjutnya data paduserasi dan Ferval di SK bupati/Walikota sebagai acuan Program dan Kegiatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan ekstrem.
- Menindaklanjuti hasil review BPKP dengan rapat koordinasi dengan OPD terkait, agar segera melakukan langkah dan kebijakan serta program dan kegiatan yang berpedoman pada data paduserasi antara data P3KE dan data DTKS.
- Menekankan kepada OPD terkait, bahwa meskipun judul program dan kegiatan mengarah pada Penanggulangan Kemiskinan, jika tidak mendasarkan pada sasaran target untuk masyarakat miskin berdasarkan BNBA, maka tidak dikategorikan sebagai program percepatan Pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Menindaklanjuti hasil review BPKP pada level kebijakan dan program serta kegiatan di level OPD dan kabupaten /Kota dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, sehingga target penurunan angka kemiskinan ekstrem mendekati 0 % pada tahun 2024 dapat tercapai. Mohon izin melaporankan hasil



pertemuan dengan tim pemeriksa BPKP tanggal 24 Maret 2023.7. Tim Tenaga Ahli menjabarkan matriks pemetaan P3KE kepada peserta rapat tentang rekomendasi hasil Reviu dan penajaman /format program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Untuk segera diisi dan dikumpulkan kepada tim TKPK Provinsi dalam waktu 1 minggu dari rapat tanggal 4 April 2023, sehingga dapat mempertajam Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ,agar pelaksanaan P3KE secara efektif dan efisien mengurangi angka kemiskinan ekstrem mendekati 0 % pada tahun 2024.

- Contoh bestpractice telah disampaikan oleh Dinas Ketapang dalam hal penentuan Pensasaran berdasarkan Data P3KE dan pemetaan wilayah Rawan Pangan dan menggunakan 9 indikator dan 3 wilayah Prioritas kawasan Rawan Pangan dan prioritas 4 untuk mengangkat wilayah yang tidak akan kembali menjadi wilayah rawan Pangan.

5. Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros , sebagai berikut :

A. Pendahuluan :

1. Tujuan Perjalanan Dinas

- Menjadi Narasumber dalam rangka Rapat Koordinasi dan membahas program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Maros
- Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, Program Penanggulangan Kemiskinan dan menemukan solusi dari kendala di lapangan.

2. Dasar Pelaksanaan Tugas Kegiatan yang dilaksanakan :

Pelaksanaan Kegiatan/Pejabat/Instansi yang menerima di tujuan Koordinasi program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, diterima oleh Wakil Bupati Maros, Kepala Bappeda dan Sekretaris Bappeda serta staf yang menangani program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros.



B. Informasi dan Hasil yang Dicapai :

1. Perjalanan dinas dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023. Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros. Kegiatan Rapat Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di buka oleh ibu wakil bupati Maros selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Maros, serta dihadiri oleh para pejabat eselon dua diantaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kepala Bappeda Maros, Kepala BPS, dan pejabat lainnya serta dihadiri perwakilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Dalam sambutannya Wakil Bupati Maros menyampaikan beberapa hal terkait dengan capaian, pelaksanaan program Penanggulangan kemiskinan, berikut pula wakil Bupati menyampaikan perkembangan jumlah orang miskin di Kabupaten Maros, pemanfaatan data P3KE serta pensasaran, penerima manfaat yang perlu di-update sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Maros.
3. Dalam Kesempatan tersebut Kepala Dinas Sosial memberi penjelasan terkait proses verifikasi dan Validasi data DTKS sebagai acuan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Dinas Sosial bekerja sama dengan Badan Inovasi Riset Nasional (BRIN) untuk menentukan pendudukmiskin berdasarkan By Name By Adress serta lokasi rumah penerima manfaat. Demikian pula menyampaikan progress penerima manfaat dan bantuan sosial yang telah dilaksanakan di kabupaten Maros.
4. Sementara Perwakilan Sekretariat TKPK Provinsi Menyampaikan beberapa hal terkait dengan surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan yang segera ditindaklanjuti oleh tim TKPK Kabupaten/Kota antara lain: Verifikasi data DTKS dan P3KE yang selanjutnya di syahkan melalui SK bupati yang selanjutnya sebagai data acuan untuk intervensi

Program dan kegiatan percepatan pelaksanaan P3KE di Kabupaten Maros.

5. Melakukan Tagging Anggaran Kemiskinan Ekstrem pada masing-masing OPD lingkup Bupati walikota dan menyampaikan laporan Pelaksanaan Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bapak Gubernur melalui tim TKPK Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2023.
6. Pada kesempatan tersebut, Tim TKPK Kabupaten Maros mengundang tenaga ahli dari perguruan tinggi lokal yaitu Universitas Muslim Maros untuk menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Maros. Dalam pemaparannya Tenaga Pendamping Kabupaten Maros menjabarkan peran dan fungsi Tim TKPK Kabupaten Maros dalam program Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau menyampaikan bahwa peran tim TKPK Kabupaten Kota sesuai dengan Peremendagri No.53 tahun 2020.
7. Para peserta sepakat untuk memberi penguatan kepada para pelaksana khususnya tim Koordinasi TKPK baik Provinsi dan Kabupaten harus didukung dengan penyiapan data base kemiskinan yang lengkap serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana aksi dan RPKD di Kabupaten Maros.



Gambar : 3.9 Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros bertempat di Aula Bupati Maros , tanggal 20 September 2023.



C. Kesimpulan / Saran Pertimbangan :

Kesimpulan :

1. Point yang penting dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan kabupaten Maros sedang mempersiapkan tahap meeting dengan instansi terkait, leading sektor program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Maros adalah Dinas Sosial yang dan Bappeda Kabupaten Maros sebagai koordinator program dan pelaksanaan kegiatan serta monitoring strategi penanggulangan kemiskinan di kabupten Maros
2. Pemerintah Provinsi sebagai institusi yang mewakili pemerintah pusat akan senantiasa melakukan supervisi dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan dokumen startegi penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah kabupaten /kota khususnya dengan pemerintah kabupaten Maros.
3. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan terkait denggan startegi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros.

D. Penutup:

Pemerintah Provinsi sebagai institusi yang mewakili pemerintah pusat akan senantiasa melakukan supervisi dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan dokumen startegi penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah kabupaten /kota khususnya dengan pemerintah kabupaten Maros

Kegiatan – Kegiatan Rapat di atas adalah beberapa contoh tata kelola penguatan kelembagaan tim TKPK provinsi dan kabupaten Kota , bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan Program Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem baik di Provinsi dan kabupaten/kota.



3.5.2 Kegiatan Monitoring Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023.

Berikut ini akan kami sajikan beberapa contoh kegiatan monitoring pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/Kota selama tahun 2023. Kegiatan Monitoring pelaksanaan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2023 antara lain

Kota Parepare

Pendahuluan :

Tujuan Perjalanan Dinas :

- Untuk mengetahui tingkat capaian dan progresivitas pelaksanaan
- Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data P3KE di Kota Parepare
- Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Parepare.
- Untuk mengetahui kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Parepare serta menemukan solusi dari kendala tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Nama Kegiatan yang dihadiri/dikunjungi
Pertemuan dengan Sekretaris Bappeda Kota Parepare dan Kepala Bidang PPM serta staf yang membidangi perencanaan penanggulangan kemiskinan.
2. Waktu Perjalanan Dinas
Perjalanan Dinas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 30 November s/d .2 Desember 2023.
3. Pelaksanaan Kegiatan/Pejabat/Instansi yang menerima di tujuan
Koordinasi program penanggulangan kemiskinan di laksanakan di kantor Bappeda Kota Parepare, diterima oleh Sekretaris Bappeda Parepare dan Kepala Bidang PPM Bappeda Kota Parepare serta staf yang menangani program penanggulangan kemiskinan di Kota Parepare.



Informasi dan Hasil yang Dicapai :

1. Pertemuan dengan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Staf PPM Kabupaten Parepare. Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P3KE khususnya pada verifikasi dan validasi data P3KE yang dilaksanakan oleh Tim TKPK Kota Parepare. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data P3KE merupakan kegiatan penting dalam upaya mensinergikan program dan kegiatan yang berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem antara Pemerintah Kota Parepare dan pemerintah Provinsi.
2. Manfaat kedua dari pelaksanaan Verval data P3KE adalah untuk mengakselerasikan pelaksanaan P3KE di seluruh wilayah Provinsi khususnya Program dan kegiatan yang menargetkan pada ketepatan sasaran penerima manfaat (khususnya masyarakat miskin ekstrem). Melalui tiga strategy yaitu strategy 1) Pengurangan beban Pengeluaran Masyarakat Miskin; 2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui pola Pemberdayaan Masyarakat dan; 3). Mengurangi Kantung-kantung Kemiskinan khususnya pada wilayah perkotaan (wilayah Kumuh) dan wilayah Remote area (Daerah 3 T).
3. Dalam pertemuan dengan bapak Sekretaris Bappeda Kota Parepare menyampaikan beberapa hal terkait dengan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Parepare. Hal yang menarik adalah, terkait dengan proses verifikasi dan validasi data P3KE sebagai data acuan untuk melakukan intervensi Program dan kegiatan yang berkontribusi dalam upaya percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Parepare. Dalam Proses verifikasi dan validasi Data P3KE di seluruh kelurahan, pemerintah kota Parepare telah menetapkan data hasil verval melalui Surat Keputusan Walikota SK Walikota No.... /Bappelitbangda/V/2023. Hasil Verval Data P3KE yang telah ditetapkan melalui SK Walikota tersebut menurun secara drastis dari angka kemiskinan ekstrem sekitar 549 menjadi 182 jiwa. Dengan demikian secara prosentase jumlah penduduk miskin yang dikategorikan sebagai miskin ekstrem sudah mendekati 0 persen dan



telah mencapai target sesuai amanat Inpres No.4 Tahun 2022 tentang percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

4. Kegiatan verifikasi dan validasi data P3KE dan telah ditetapkan sebagai data acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang melekat pada Perangkat Daerah, dan berkolaborasi dengan mitra pembangunan lainnya seperti, NGO, Lembaga Donor, Perbankan, Baznas dan lainnya. Pemerintah Kota Parepare sendiri telah memiliki program integratif dalam upaya melaksanakan program P3KE agar percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kota Parepare dapat berjalan dengan baik dan sesuai target yang diinginkan bersama. Pemerintah Kota Parepare telah menganggarkan dana sebesar Rp.82 Milyar yang terdistribusi ke beberapa unit kerja Perangkat Daerah pada Lingkup Kota Parepare.
5. Untuk Memperkuat dampak positif dari Pelaksanaan P3KE di Kota Parepare, Kepala Bidang PPM memberi masukan kepada tim Monitoring dan Evaluasi, agar Pemerintah Provinsi menyusun Peraturan Gubernur atau petunjuk teknis agar pemerintah Kabupaten Kota memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat miskin ekstrem pada kegiatan proyek padat karya, sehingga akan memperoleh manfaat bagi percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten kota.
6. Dalam kesempatan Monev tersebut, tim TKPK Provinsi sekaligus menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui tim Sekretariat TKPK sedang mengembangkan sebuah aplikasi sistem manajemen informasi yang dikenal sebagai aplikasi SIAP Boss. Aplikasi Siap Boss ini akan menjadi sasara untuk mengelola data dan informasi terpadu dalam proses; verifikasi dan validasi; perencanaan dan penganggaran Program dan kegiatan yang berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan ekstrem pada lingkup pemerintah Provinsi.
7. Selanjutnya Siap Boss akan direplikasikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten Kota. Pemerintah Kota Parepare diharapkan akan mengadopsi dan memperluas jaringan pemanfaatan aplikasi Siap Boss pada proses-proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pro



kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di kota Parepare, hingga target sesuai amanat Inpres No.4 Tahun 2024 untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0 persen pada tahun 2024 dapat terwujud termasuk di kota Parepare.

Kesimpulan / Saran Pertimbangan :

Kesimpulan :

1. Point yang penting dalam proses Verifikasi dan Validasi data P3KE di kota Parepare. Hasil Verval data P3KE akan dimasukkan ke dalam aplikasi Siap Boss. Pengembangan aplikasi Siap Boss yang dilakukan oleh Tim TKPK Provinsi bekerjasama dengan Programmer dari Bantaeng dan di support oleh USAID Erat.
2. Hasil Verval data P3KE di Kota Parepare merupakan bagian dari Proses mempercepat pelaksanaan P3KE dan integrasi program penanggulangan kemiskinan di kota Parepare adalah Dinas Sosial yang dan Bappeda Kota Parepare sebagai koordinator program dan pelaksanaan kegiatan serta monitoring strategi penanggulangan kemiskinan di kota Parepare.
3. Pemerintah Provinsi sebagai institusi yang mewakili pemerintah pusat akan senantiasa melakukan supervisi dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah kabupaten /kota khususnya dengan pemerintah kota Parepare Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan terkait dengan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Parepare.

Saran dan Pertimbangan

Pemerintah Provinsi sebagai institusi yang mewakili pemerintah pusat akan senantiasa melakukan Monitorig dan evaluasi atas pelaksanaan P3KE ke Kabuapten Kota dalam mewujudkan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah kabupaten /kota khususnya dengan pemerintah kota Parepare.

2. Coaching Klinik Reformasi Birokrasi Tematik Kemiskinan Ekstrem

Pendahuluan :

Tujuan Perjalanan Dinas Dalam rangka Kegiatan Coaching Clinic RB tematik berkarakter. Pelaksanaan tanggal 2-4 Agustus 2023 bertempat di Hotel Mercure Jakarta.Jl. Hayam Wuruk 127 Jakarta.

Dasar Pelaksanaan Tugas

Kepala Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 005/8335/B.Org Tanggal 28 Juli 2023. Perihal Undangan Coaching Clinic Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan tanggal 2-4 Agustus 2023 bertempat di Hotel Mercure Jakarta.Jl. Hayam Wuruk 127 Jakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan :

Melaksanakan Tugas dalam rangka mengikuti Coaching Clinic Penyusunan Kerangka Logis dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Kemiskinan Ekstrem., di Hotel Mercure DKI Jakarta.



Gambar 3. 10 Coaching Clinic Penyusunan Kerangka Logis dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Kemiskinan Ekstrem; Tanggal 2-4 Agustus 2023, di Hotel Mercure Jakarta.

Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka mengikuti Coaching Clinic Penyusunan Kerangka Logis dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik., di Hotwllk Mercure DKI Jakarta.



Informasi dan Hasil yang Dicapai :

Kegiatan Coaching Clinic RB tematik berkarakter. Pelaksanaan tanggal 2-4 Agustus 2023 bertempat di Hotel Mercure Jakarta.Jl. Hayam Wuruk 127 Jakarta.

Peserta :

OPD provinsi Sulawesi selatan. Narasumber : Kemenpan RB dan Biro Organisasi.

Hasil pelaksanaan.

1. Acara Coaching clinic dibuka asisten administrasi Pemprov.Suslel bapak Dr. Tau Toto. Dan didampingi asisten deputi wilayah III Kemenpan RB. Memberi pengarahan terkait pentingnya coaching clinic RB tematik berkarakter dalam pelayanan publik dan kinerja instansi pemerintah khususnya bagi pemerintah provinsi Sulsel.
2. Dalam penjelasan asisten deputi wilayah III membagi dua bagian besar RB general yang lebih mengutamakan pada tata kelola pemerintahan, sedangkan pada RB tematik lebih mengedepankan pada pelaksanaan teknis misalnya tematik kemiskinan , stunting , ketenagakerjaan, kesehatan dan lainnya.
3. Bapak asisten deputi III memberi penjelasan terkait pentingnya coaching clinic dalam peningkatan pelayanan publik,. Beliau membandingkan tingkat berbagai bidang pelayanan publik Indonesia dengan negara2 di Asean, dan di negara eropah dan level pelayanan publik kita di level dunia. Dalam posisi tersebut, pemerintah Indonesia /pusat dan pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan kita di level asia dan level dunia.
4. Sementara itu ibu Nabila dari Kemenpan RB memberi penjelasan secara General dan teknis terkait dengan RB tematik kemiskinan.
5. Dalam kesempatan itu , wakil sekretariat TKPK juga menyampaikan progress pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan serta kendala dan tantangannya yang dihadapi dalam mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem sesuai amanat inpres no. 4 tahun



2022. Dimana target pemerintah pusat untuk menurunkan kemiskinan ekstrim hingga mendekati 0 persen pada tahun 2024.

6. Setelah mendengar berbagai masukan dan berdasarkan draft RB tematik kemiskinan yang telah dipresentasikan oleh tim dari biro Ortala yang telah membuat RB tematik yang terdiri dari 6 bidang dan masing masing bidang utama telah dibuat rencana aksinya.

Kesimpulan / Saran Pertimbangan :

Kesimpulan :

Dari hasil diskusi dan masukan dari Para peserta memberi kesimpulan bahwa tidak semua RB tematik harus dibuatkan rencana aksi. Namun perlu dilihat kondisi yang melingkupi serta prioritas masalah yang dihadapi dan segera harus ditindaklanjuti agar pelayanan publik dan kinerja pemerintah Provinsi Sulsel semakin baik. Untuk selanjutnya pembahasan RB tematik berkarakter akan dilanjutkan pada pertemuan- pertemuan lanjutan pada lingkup pemerintah provinsi Sulsel.

Demikian beberapa hal yang dapat kami simpulkan dan laporkan hasil coaching clinic RB tematik berkarakter pemerintah provinsi Sulsel bekerja sama dengan Kemenpan RB RI di Jakarta.

d. Kegiatan Fokus Group Discussion Kemiskinan dan Stunting di Kabupaten Luwu Utara 2023

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Pengaruh Kemiskinan terhadap Stunting di Kabupaten Luwu Utara. Waktu Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 29 s/d 31 Agustus 2023.

Pelaksanaan Kegiatan/Pejabat/Instansi yang menerima di tujuan

Focus Group Diskusi (FGD) Pengaruh Kemiskinan terhadap Stunting di Kabupaten Luwu Utara. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara membuka Acara dan Sekretaris Bappeda serta tim Peneliti dari LPPM Universitas Hasanuddin, Makassar, perwakilan dari OPD terkait; Dinas Kesehatan,



Pendidikan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial, BPS, Dukcapil, P3A Dalduk KB, dan dinas lainnya.

Informasi dan Hasil yang Dicapai :

- a. Perjalanan dinas dilaksanakan pada tanggal 29 s/d31 Agustus 2023. Pelaksanaan Kegiatan/Pejabat/Instansi yang menerima di tujuan
- b. Focus Group Diskusi (FGD) Pengaruh Kemiskinan terhadap Stunting di Kabupaten Luwu Utara. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara membuka Acara dan Sekretaris Bappeda serta tim Peneliti dari LPPM Universitas Hasanuddin, Makassar, perwakilan dari OPD terkait; Dinas Kesehatan, Pendidikan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial, BPS, Dukcapil, P3A Dalduk KB, dan dinas lainnya, dan pejabat lainnya serta dihadiri perwakilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Dalam Focus Group Diskusi tersebut, tim Peneliti menyampaikan tujuan dari Penelitian ini, terkait dengan Pengaruh Kemiskinan terhadap angka stunting di Kabupaten Luwu Utara. Dalam kesempatan tersebut OPD terkait menyampaikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Utara.
- d. Pemerintah kabupaten Luwu Utara berupaya untuk mengimplementasikan inrpes No. 4 tahun 2022, tentang dengan melakukan verifikasi dan validasi data P3KE dan Data DTKS. Hasil veifikasi dan Validasi data P3Ke dan DTKS di SK bupati, dan menjadi rujukan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara.
- e. Upaya lainnya pemerintah Kabupaten sedang melakukan pendekatan dengan CSR antarlain; Perbankan, Baznas, PT Vale dan unsur swasta lainnya untuk mensupport anggaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara.
- f. Pemerintah kabupaten Luwu Utara melalui sekretariat TKPK Kabupaten telah menetapkan lokus Desa Kemiskinan ekstrem yang akan diimplementasikan pada kegiatan penanggulangan kemiskinan berikutnya.



Kesimpulan / Saran Pertimbangan :

Kesimpulan :

1. Point yang penting dalam implementasi penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem di kabupaten Luwu Utara sedang melakukan proses implementasi pengurangan /penghapuskemiskinan ekstrem, OPD terkait mengalokasikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Luwu Utara adalah Dinas Sosial yang dan Bappeda Kabupaten Luwu Utara sebagai koordinator program dan pelaksanaan kegiatan serta monitoring strategi penanggulangan kemiskinan di kabupten Luwu Utara .
2. Pemerintah kabupaten Luwu Utara berupaya untuk mengimplementasikan inrpes No. 4 tahun 2022, tentang dengan melakukan verifikasi dan validasi data P3KE dan Data DTKS. Hasil veifikasi dan Validasi data P3KE dan DTKS di SK bupati, dan menjadi rujukan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara.
3. Kerjsa-kerja kolaboratif antar stakeholders di Kabupaten Luwu Utara sedang melakukan pendekatan dengan CSR antara lain; Perbankan, Baznas, PT Vale dan unsur swasta lainnya untuk mensupport anggaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara.
4. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan terkait denngan startegi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara.

Penutup:

Melalui kegiatan Monitoring dan dirangkaikan dengan kegiatan Focus Group Diskusi pengaruh kemiskinan terhadap angka stunting di kabupaten Luwu Utara, diharapkan mendapat informasi yang komprehensif dan memberi rekomendasi pemerintah provinsi dan kabupaten Luwu Utara dalam melakukan supervisi dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah kabupaten /kota khususnya dengan pemerintah kabupaten Luwu Utara.



e. Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Verifikasi dan Validasi Data P3KE melalui aplikasi SIAP BOSS tahun 2023.

Pendahuluan :

- Mensosialisasikan Pengembangan Aplikasi Siap Boss di Kabupaten Luwu Timur
- Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data P3KE di Kabupaten Luwu Timur
- Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Luwu Timur.
- Untuk mengetahui kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Siap Boss di Kabupaten Luwu Timur.

Dasar Pelaksanaan Tugas

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 094/
/PPM/Bappelitbangda: Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi Siap Boss di Kabupaten Luwu Timur .

Kegiatan yang dilaksanakan :

Nama Kegiatan yang dihadiri/dikunjungi

Pertemuan dengan Staf Ahli Bidang Pembangunan bapak Raffiuddin Thahir dan Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur , Tim TKPK Kabupaten Luwu Timur serta para Operator P3KE pada OPD lingkup Kabupaten dan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Luwu Timur.

Waktu Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 13-s/d 15 November 2023. Pelaksanaan Kegiatan/Pejabat/Instansi yang menerima di tujuan Mensosialisasikan Pengembangan Aplikasi Siap Boss di Kabupaten Luwu Timur diterima oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan bapak Raffiuddin Thahir dan Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur , Tim TKPK Kabupaten Luwu Timur serta para Operator P3KE pada OPD lingkup Kabupaten dan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Luwu Timur.



Informasi dan Hasil yang Dicapai :

Perjalanan dinas dilaksanakan pada tanggal 13. s/d 15 .November 2023. Pertemuan sosialisasi Siap Boss dibuka oleh bapak Raffiuddin Thahir staf Ahli Bidang Pembangunan di dampingi oleh Kepala Bappeda beserta tim TKPK kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Siap Boss bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Verval data P3KE adalah untuk mengakselerasikan pelaksanaan P3KE di seluruh wilayah Provinsi khususnya Program dan kegiatan yang menargetkan pada ketepatan sasaran penerima manfaat (khususnya masyarakat miskin ekstrem). Melalui tiga strategy yaitu startegy 1) Pengurangan beban Pengeluaran Masyarakat Miskin; 2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui pola Pemberdayaan Masyarakat dan ; 3). Mengurangi Kantung-kantung Kemiskinan khususnya pada wilayah perkotaan (wilayah Kumuh) dan wilayah Remote area (Daerah 3 T).

Dalam pertemuan dengan bapak Raffiuddin Thahir menyampaikan beberapa hal terkait dengan pentingnya pelaksanaan sosialisasi aplikasi Siap Boss, khususnya bagi para operator P3KE baik di instansi Perangkat Daerah maupun pada level Desa dan Kelurahan.

Bapak Raffiuddin staf ahli Bidang Pembangunan dan Kepala Bappeda mengharapkan agar aplikasi Siap Boss dapat secara serentak dimanfaatkan dalam proses verifikasi dan validasi data P3KE dan menjadi data acuan untuk melakukan intervensi Program dan kegiatan yang berkontribusi dalam upaya percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan eskترم di Kabupaten Luwu Timur.



Gambar 3.11 Pelaksanaan Sosialisasi tata cara Verifikasi dan Validasi Data P3KE melalui Aplikasi SIAP BOSS 14 November 2023 bertempat di Aula Kantor Bupati Luwu Timur.

Dalam kesempatan tersebut, tim perwakilan TKPK Provinsi sekaligus menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui tim Sekretariat TKPK sedang mengembangkan sebuah aplikasi sistem manajemen informasi yang dikenal sebagai aplikasi SIAP Boss. Aplikasi Siap Boss ini akan menjadi sasara untuk mengelola data dan informasi terpadu dalam proses; verifikasi dan validasi ; perencanaan dan penganggaran Program dan kegiatan yang berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan ekstrem pada lingkup pemerintah Provinsi dan selanjutnya akan direplikasikan ke seluruh wilayah KabupatenKota di Sulawesi Selatan.



Selanjutnya pak Abdul Azis selaku tim Programmer Aplikasi verifikasi dan validasi data P3KE dalam sistem aplikasi Siap Boss secara teknis bersama operator Kabupaten membuat username (nama Pengguna) dan password kepada perwakilan OPD dan perwakilan desa dan kelurahan.

Dalam pelaksanaan sosialisasi verval Siap Boss di Luwu Timur berjalan baik dan sukses, karena pada awalnya hanya akan melatih beberapa perwakilan operator dari OPD dan perwakilan desa dan kelurahan, namun tim TKPK Kabupaten mengundang seluruh Operator Desa kelurahan di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Meskipun ada beberapa kendala terkait jaringan internet dan juga terkendala pembuatan user desa dan para operator desa belum mengirimkan nama operatornya. Mereka mengusulkan agar ada pertemuan sosialisasi lanjutan untuk meningkatkan kapasitas paraoperator desa dalam menggunakan menerapkan aplikasi siap boss dalam proses verval data P3KE, perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan P3KE di masing-masing OPD, desa dan kelurahan.

Selanjutnya aplikasi Siap Boss akan direplikasikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten Kota. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperluas jaringan pemanfaatan aplikasi Siap Boss pada proses-proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pro kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Timur, hingga target sesuai amanat Inpres No.4 Tahun 2024 untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0 persen pada tahun 2024 dapat terwujud termasuk di Kabupaten Luwu Timur.

Kesimpulan / Saran Pertimbangan :

Kesimpulan :

Dalam proses Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data P3KE ke dalam sistem aplikasi Siap Boss di Kabupaten Luwu Timur, akan meningkatkan pengetahuan para operator padalingkup OPD dan Desa kelurahan. Pengembangan aplikasi Siap Boss yang dilakukan oleh Tim TKPK Provinsi bekerjasama dengan



Programmer dari Bantaeng dan mendapatkan support penuh dari Pemerintah Provinsi dan kabupaten kota serta dari USAID Erat.

Sosialisasi Verval data P3KE ke dalam sistem aplikasi Siap Boss di Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari Proses mempercepat pelaksanaan P3KE dan integrasi program dan kegiatan percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah Provinsi sebagai institusi yang mewakili pemerintah pusat akan senantiasa melakukan supervisi dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan dokumen startegi penanggulangan kemiskinan dan pelaksanaan P3KE yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah kabupaten /kota khususnya dengan pemerintah kabupaten Luwu Timur.

Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan terkait kegiatan Sosialisasi veifikasi dan validasi Data P3Keke dalam aplikasi Siap Boss di Kabupaten Luwu Timur.

E. Penutup :

Pemerintah Provinsi sebagai institusi yang mewakili pemerintah pusat akan senantiasa melakukan Monitorig dan evaluasi atas pelaksanaan P3KE ke Kabuapten Kota dalam mewujudkan dokumen startegi penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah kabupaten /kota khususnya dengan pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Selanjutnya aplikasi Siap Boss akan direplikasikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten Kota. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperluas jaringan pemanfaatan aplikasi Siap Boss pada proses-proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pro kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Timur, hingga target sesuai amanat Inpres No.4 Tahun 2024 untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0 persen pada tahun 2024 dapat terwujud termasuk di Kabupaten Luwu Timur



3.6. Strategi sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan Pemberdayaan ekonomi

Strategi Sinergi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan Ekonomi, melalui :

Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan Penanggulangan kemiskinan melibatkan berbagai prinsip dan pendekatan yang kompleks. Adapun lima prinsip yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menanggulangi kemiskinan, yaitu :

1. Tepat sasaran, yaitu program penanggulangan kemiskinan menggunakan data penduduk miskin yang akurat dan terkini, baik data P3KE, DTKS dengan terintegrasi dengan Regsosek.
2. Koordinasi dan Kerjasama pentahelix, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan memerlukan koordinasi dan Kerjasama oleh semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat dan daerah, Universitas, Forum CSR dan semua pihak non pemerintah lainnya.

BAB 4.

STRATEGI KEBIJAKAN DAN MATRIKS RENCANA AKSI TAHUN 2024

4.1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan



Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah yang dilakukan secara tematik, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan Masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan melibatkan berbagai prinsip dan pendekatan yang kompleks. Adapun lima prinsip yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menanggulangi kemiskinan, yaitu :

1. Tepat sasaran, yaitu program penanggulangan kemiskinan menggunakan data penduduk miskin yang akurat dan terkini, baik data P3KE, DTKS dengan terintegrasi dengan Regsosek.
2. Koordinasi dan Kerjasama pentahelix, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan memerlukan koordinasi dan Kerjasama oleh semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat dan daerah, Universitas, Forum CSR dan semua pihak non pemerintah lainnya.
3. Pendekatan multidimensi, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai dimensi, seperti kesetaraan gender, inklusi sosial (disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan), dan Pembangunan berkelanjutan.
4. Konvergen dan komplementer : penduduk miskin menerima berbagai



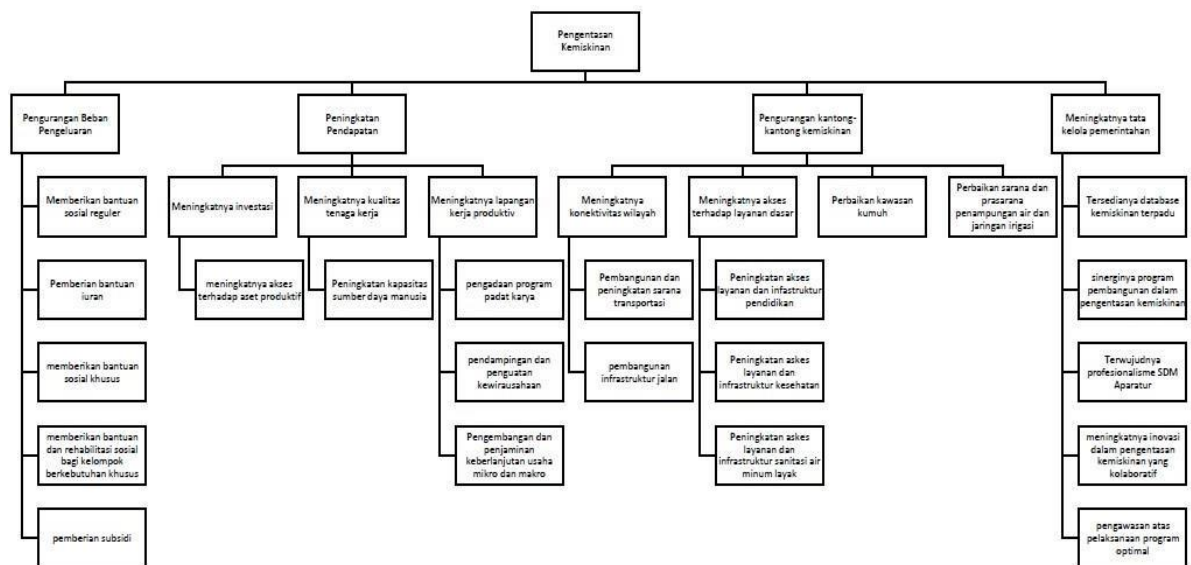
**(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

program perlindungan sosial dan perbaikan siklus kehidupan dengan berbagai program pemberdayaan sehingga penduduk miskin dapat keluar dari kondisi kemiskinannya.

5. Pemberdayaan ekonomi, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kewirausahaan serta menciptakan peluang pekerjaan utamanya bagi Masyarakat miskin ekstrem.
6. Sosialisasi dan edukasi, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan pola pikir kepada seluruh pihak terkait strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Terpantau dan terkendali, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara rutin dengan menggunakan indikator yang terukur.

Perumusan strategi dan arah kebijakan melalui pendekatan tematik untuk menjamintercapainya target yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan perencanaan strategi dan arah kebijakan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah tema pengentasan kemiskinan. Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan di jabarkan dalam kerangka berpikir logis sebagai berikut :

Gambar 4.1. Diagram Logframe Pengentasan Kemiskinan





4.2. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui 4 strategi :

1. Strategi satu, Pengurangan beban pengeluaran Masyarakat

Diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran Masyarakat, diantaranya melalui :

- a. Bantuan sosial regular, seperti program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar;
- b. Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos regular, dan Bantuan Beras;
- c. Bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
- d. Subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji;
- e. Pemberian bantuan perbaikan rumah bagi korban bencana;
- f. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JKN).

2. Strategi dua, Peningkatan pendapatan Masyarakat

Diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan Masyarakat, diantaranya melalui :

- a. Peningkatan pendapatan/ akses pekerjaan dan penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui Program padat karya dan bantuan individu/ kelompok;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan;
- c. Peningkatan kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan;
- d. Peningkatan akses pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap



Lembaga keuangan formal baik bank maupun non bank seperti Kredit Usaha Rakyat.

3. Strategi tiga, Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Merupakan sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi diantaranya melalui :

- a. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur Pendidikan, layanan dan infrastruktur Kesehatan dan infrastruktur sanitasi air minum layak;
- b. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti Pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta Pembangunan infrastruktur jalan;
- c. Perbaikan Kawasan kumuh;
- d. Perbaikan sarana dan prasarana penampungan air dan jaringan irigasi.

4. Strategi empat, Meningkatnya tata Kelola pemerintahan

Merupakan sinergi kebijakan dalam rangka perbaikan dan efisiensi dalam pemerintahan yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas kebijakan, yang diantaranya melalui :

- a. Ketersediaan database kemiskinan terpadu;
- b. Pengelolaan Data sasaran penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis teknologi digital;
- c. Tersinerginya program Pembangunan dalam pengentasan kemiskinan;
- d. Peningkatan akurasi cakupan penerima, ketercakupan manfaat dan mekanisme pelaksanaan program
- e. Terwujudnya profesionalitas SDM Aparatur;
- f. Meningkatnya inovasi dalam pengentasan kemiskinan yang kolaboratif;
- g. Optimalnya pengawasan atas pelaksanaan program.



4.3. Rencana Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Rencana Pelaksanaan Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- a. Konvergensi Program Penanggulangan Kemiskinan (Pengurangan beban pengeluaran, peningkatan produktivitas dan pendapatan, pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan);
- b. Peningkatan kemitraan dengan sektor non pemerintah;
- c. Sinkronisasi dan pemutakhiran data melalui verifikasi dan validasi Data P3KE agar sinkron dengan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menghasil data sebagai basis penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Tagging alokasi anggaran dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Sulawesi Selatan menyasar langsung Masyarakat P3KE;
- e. Pengembangan aplikasi SIAP BOSS (Sistem Informasi Program, Budget, Monitoring Kemiskinan Ekstrem Sulawesi Selatan) sebagai instrument dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengelola data P3KE dan mengidentifikasi program dan kegiatan yang menyentuh langsung data P3KE (by name by address) untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran;
- f. Integrasi aplikasi SIAP BOSS dengan Sepakat Bappenas;
- g. Menyusun timeline rencana kerja sampai dengan Desember 2024 sebagai dasar percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Selatan;
- h. Pemenuhan SPM Urusan Wajib pelayanan Dasar;
- i. Pengurangan beban Pengeluaran bagi kelompok miskin dan rentan melalui perlindungan sosial dan subsidi;
- j. Peningkatan produktivitas dan pendapatan bagi kelompok Masyarakat miskin melalui Pelatihan Keterampilan Kerja, Pemberdayaan Usaha serta

Akses pada Pasar Tenaga Kerja;

- k. Fasilitasi Masyarakat miskin ekstrem untuk membentuk kelompok sesuai potensinya;
- l. Fasilitasi Masyarakat miskin ekstrem untuk bergabung dalam kelompok Masyarakat eksisting di daerahnya;
- m. Untuk program dan kegiatan yang secara juknis tidak dapat menyentuh langsung Masyarakat P3KE atau pemberian hanya dapat diberikan kepada kelompok Masyarakat eksisting, maka dilakukan dengan cara mempersyaratkan adanya pernyataan dari kelompok penerima bantuan bahwasanya :
 - Akan memperkerjakan Masyarakat miskin yang terdaftar di P3KE pada lahan usahanya;
 - Akan membagi hasil usahanya secara berkala kepada masyarakat miskin yang terdaftar di P3KE.

Salah satu contohnya pola kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut :

**Gambar 4.2 Pola Pengentasan Kemiskinan pada Dinas Peternakan
Provinsi Sulawesi Selatan**





Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026, sebagaimana termuat dalam tujuan meningkatnya kesejahteraan Masyarakat secara merata dengan sasaran Pembangunan yaitu menurunnya Angka Kemiskinan, dengan strategi sebagai berikut Meningkatkan pendapatan dan Kualitas sumber daya manusia serta Pemerataan akses Masyarakat pelayanan dasar Masyarakat miskin dalam Upaya mengurangi pengeluaran Masyarakat miskin dan kantong-kantong kemiskinan.

Dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan sudah bersifat konvergen atau cross cutting atau Kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah dengan lokus sasaran yang sama. Selanjutnya dapat disampaikan detail Rencana Aksi Tahunan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam table 4.1 sebagai berikut :



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Tabel 4.1
Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

| NO | NAMA OPD | PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN | KETERANGAN (bahasa operasional kegiatan) | TARGET SUB KEGIATAN | LOKASI | RKA 2024 berdasarkan sumber dana | | | STRATEGI |
|----|--------------------------------------|---|--|---------------------|--------|----------------------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | | | APBD | DANA TRANSFER (DAK,DAU,CH T, DID,DEKONSENTRASI,BOS,B OK, CSR, NON APBD LAINNYA) | TOTAL ANGGARAN | 1. Pengurangan Beban Pengeluaran, 2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat 3. Pengurangan Kantong - Kantong Kemiskinan 4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | DINAS KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | Rp. 81,579,494,600,- | Rp0 | Rp81,579,494,600 | |
| | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp81,579,494,600 | Rp0 | Rp81,579,494,600 | 1.PENGURANGAN BEBAN PENGELUARAN |
| | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | BPIS KESEHATAN | | | Rp81,579,494,600 | | Rp81,579,494,600 | |
| | | Grand Total | | | | Rp81,579,494,600 | Rp0 | Rp81,579,494,600 | |
| 2 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | | | | Rp2,046,500,900 | Rp0 | Rp2,046,500,900 | |
| | | Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral | | | | Rp2,046,500,900 | Rp0 | Rp2,046,500,900 | |
| | | Pelaksanaan kegiatan konservasi energi | Pemberian bantuan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) khususnya kepada Rumah Tangga kurang mampu, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai penerima barang yang akan diserahkan. | 170 Rumah Tangga | | Rp2,046,500,900 | Rp0 | Rp2,046,500,900 | 1.PENGURANGAN BEBAN PENGELUARAN |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | Rp715,310,000 | Rp0 | Rp715,310,000 | |



**(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|--|------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|
| | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | Rp715,310,000 | Rp0 | Rp715,310,000 | |
| | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Pemberian bantuan pemasangan baru listrik khususnya kepada Rumah Tangga kurang mampu, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai penerima barang yang akan diserahkan. | 242 Rumah Tangga | | Rp715,310,000 | Rp0 | Rp715,310,000 | 1.PENGURANGAN BEBAN PENGELUARAN |
| | | Grand Total | | | | Rp2,761,810,900 | Rp0 | Rp2,761,810,900 | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---|--|---|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|
| 3 | Dukcapil | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI | | | | Rp77,533,000 | Rp0 | Rp77,533,000 | | |
| | | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | | | | | Rp77,533,000 | Rp0 | Rp77,533,000 | |
| | | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Meningkatnya PKS Pemanfaatan Data Kependudukan bagi OPD terkait | Jumlah OPD yang melakukan Pemanfaatan Data Kependudukan | Lingkup OPD Pemprov Sulsel | | Rp77,533,000 | Rp0 | Rp77,533,000 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan |
| | | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Meningkatnya ketersediaan Dokumen Kependudukan bagi penerima bantuan | Tersedianya Dokumen Kependudukan bagi penerima bantuan | 24 Kabupaten/Kota | | Rp94,914,100 | Rp0 | Rp94,914,100 | |
| Grand Total | | | | | | Rp172,447,100 | Rp0 | Rp172,447,100 | | |
| 4 | DINAS KETAHANAN PANGAN | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | Rp40,002,700 | Rp0 | Rp40,002,700 | | |
| | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | | | | Rp40,002,700 | Rp0 | Rp40,002,700 | | |
| | | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Intervensi Bantuan Daerah Rentan Rawan Pangan dan Gizi Bibit Hortikultura, Bibit Tanaman Pangan, Benih ikan, Unggas/Ternak Kecil | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 95 Kelompok | | Rp40,002,700 | Rp0 | Rp40,002,700 | Peningkatan Pendapatan Masyarakat |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | Rp245,073,600 | Rp0 | Rp245,073,600 | |
| | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | | | | | Rp19,939,000 | Rp0 | Rp19,939,000 | |
| | | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | Bantuan Pangan Rumah Tangga Miskin Beras | Jumlah Rumah Tangga Miskin | 100 Rumah Tangga | | Rp19,939,000 | Rp0 | Rp19,939,000 | Pengurangan Beban Pengeluaran |
| | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | Rp225,134,600 | Rp0 | Rp225,134,600 | | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Bibit Hortikultura, Benih ikan | Jumlah Kelompok | 35 Dokumen/ Kelompok | Rp159,994,600 | Rp0 | Rp159,994,600 | Peningkatan Pendapatan Masyarakat |
| | | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Bantuan Pengembangan Pangan Lokal, BANTUAN BIBIT DAN BINIH BIBIT PISANG, BENIH JAGUNG MANIS/PULUT | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | | Rp65,140,000 | Rp0 | Rp65,140,000 | |
| | | Grand Total | | | | Rp285,076,300 | Rp0 | Rp285,076,300 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|--|---|-------------------|------------------------|------------|------------------------|--|
| 5 | DINAS PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Rp4,300,000,000 | Rp0 | Rp4,300,000,000 | |
| | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | Rp4,200,000,000 | Rp0 | Rp4,200,000,000 | |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | Rp4,200,000,000 | Rp0 | Rp4,200,000,000 | Pengurangan Kantong kantong Kemiskinan |
| | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | Rp100,000,000 | Rp0 | Rp100,000,000 | |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | | Rp100,000,000 | Rp0 | Rp100,000,000 | Pengurangan Kantong kantong Kemiskinan |
| | | Grand Total | | | | Rp4,300,000,000 | Rp0 | Rp4,300,000,000 | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | Rp1,377,132,300 | Rp0 | Rp1,377,132,300 | |
| | | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | | | | Rp1,377,132,300 | Rp0 | Rp1,377,132,300 | |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | Bimbingan Teknis Penyusunan Program Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal Bagi Petugas Dinas Sosial dan Pendamping Kab/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | 24 Kabupaten/Kota | Rp1,184,964,400 | Rp0 | Rp1,184,964,400 | Pengurangan Beban Pengeluaran |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | Bimbingan teknis lembaga kesejahteraan sosial (LKS), Sosialisasi Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi | 24 Kabupaten/Kota | Rp192,167,900 | Rp0 | Rp192,167,900 | Pengurangan Beban Pengeluaran |
| | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBANTINDAK KEKERASAN | | | | Rp318,971,500 | Rp0 | Rp318,971,500 | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|--|-------------------|------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | | | | Rp318,971,500 | Rp0 | Rp318,971,500 | |
| | | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | makan minum dan Transport Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal (luar daerah) | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota | Makassar | Rp318,971,500 | Rp0 | Rp318,971,500 | Pengurangan Beban Pengeluaran |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | Rp1,159,162,200 | Rp0 | Rp1,159,162,200 | |
| | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | | | | Rp1,159,162,200 | Rp0 | Rp1,159,162,200 | |
| | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Bantuan Usaha Ekonomi Produktif , Pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama Kepada Masyarakat Miskin Ekstrim | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi | 24 Kabupaten/Kota | Rp140,000,000 | Rp0 | Rp140,000,000 | Pengurangan Beban Pengeluaran |
| | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Pemberian bantuan uang yang diserahkan kepada Masyarakat (Kusta) | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi | Makassar | Rp716,400,000 | Rp0 | Rp716,400,000 | Pengurangan Beban Pengeluaran |
| | | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Bimbingan Keterampilan Penerima Bantuan Sosial KUBE , Bimbingan Teknis Penerima Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama, Bimtek penerimaan bantuan UEP dan Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau- pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota | 24 Kabupaten/Kota | Rp302,762,200 | Rp0 | Rp302,762,200 | Pengurangan Beban Pengeluaran |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp2,946,577,560 | Rp0 | Rp2,946,577,560 | |
| 6 | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | Rp1,721,861,900 | Rp0 | Rp1,721,861,900 | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|--|
| | | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari | Penyediaan peningkatan sdm penerima manfaat dalam panti | Jumlah anak yang mendapatkan pelatihan | Makassar, Bone, Maros dan Bulukumba | Rp303,019,000 | Rp0 | Rp303,019,000 | SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN, K.E, STUNTING, WASTING |
| | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Penyediaan peningkatan sdm penerima manfaat dalam panti | Jumlah anak yang mendapatkan pelatihan | Makassar, Bone, Maros dan Bulukumba | Rp113,570,100 | Rp0 | Rp113,570,100 | SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN, K.E, STUNTING, WASTING |
| | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Pelaksanaan penelusuran keluarga penerima manfaat | Jumlah anak yang mendapatkan pelatihan | Makassar, Bone, Maros dan Bulukumba | Rp151,939,000 | Rp0 | Rp151,939,000 | SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN, K.E, STUNTING, WASTING |
| | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | Penyediaan alat bahan untuk keperluan asrama / tempat tinggal | Jumlah anak yang mendapatkan tempat rehab yang layak | Makassar, Bone, Maros dan Bulukumba | Rp44,892,200 | Rp0 | Rp44,892,200 | SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN, K.E, STUNTING, WASTING |
| | | Penyediaan Makanan | Penyediaan bahan permakanan untuk penerima manfaat dalam panti | Jumlah anak yang mendapatkan makan dan minum dalam panti | Makassar, Bone, Maros dan Bulukumba | Rp1,045,256,100 | Rp0 | Rp1,045,256,100 | SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN, K.E, STUNTING, WASTING |
| | | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | Penyediaan obat obatan dalam panti | Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan atau pengobatan sakit ringan | Makassar, Bone, Maros dan Bulukumba | Rp33,886,800 | Rp0 | Rp33,886,800 | SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN, K.E, STUNTING, WASTING |
| | | Penyediaan Sandang | penyediaan pakaian untk penerima manfaat dalam panti | Jumlah anak yang mendapatkan pakaian | Makassar, Bone, Maros dan Bulukumba | Rp29,298,700 | Rp0 | Rp29,298,700 | SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN, K.E, STUNTING, WASTING |
| | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti | | | | Rp773,199,860 | Rp0 | Rp773,199,860 | |
| | | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari | Penyediaan bahan pemberian aktifitas keterampilan dalam panti | Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan bimbingan | pare pare | Rp30,293,800 | Rp0 | Rp30,293,800 | SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN/KEMISKINAN EKTREAM |
| | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Pemberian bimbingan spritual kepada lanjut usia terlanta dalam panti | Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan bimbingan spritual | pare pare | Rp12,000,000 | Rp0 | Rp12,000,000 | SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN/KEMISKINAN EKTREAM |
| | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Penelusuran keluarga lanjut usia terlantar yang di tangan dalam panti | Jumlah lajut usia yang ditelusuri keluarganya | pare pare | Rp48,330,000 | Rp0 | Rp48,330,000 | SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN/KEMISKINAN EKTREAM |
| | | Pemulasaraan | Pelaksanaan pemakaman kepada lanjut usia yang telah meninggal dunia dalam panti | Jumlah lanjut usia yang telah dimakamkan | pare pare | Rp80,000,300 | Rp0 | Rp80,000,300 | SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN/KEMISKINAN EKTREAM |
| | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | Penyediaan peralatan untuk kebutuhan bangunan dan penerangan asrama | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan tempat / asrama yang layak | pare pare | Rp10,096,800 | Rp0 | Rp10,096,800 | SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN/KEMISKINAN EKTREAM |
| | | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | Penyediaan obat-obatan dalam panti | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pengobatan apabila sakit | pare pare | Rp4,999,960 | Rp0 | Rp4,999,960 | SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN/KEMISKINAN EKTREAM |
| | | Penyediaan Permakanan | Penyediaan bahan permakanan untuk lanjut usia terlantar dalam panti | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan makan dan minum dalam panti | pare pare | Rp574,875,000 | Rp0 | Rp574,875,000 | SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN/KEMISKINAN EKTREAM |
| | | Penyediaan Sandang | Pemberian baju atau sarung yang layak kepada lanjut usia terlantar dalam panti | Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan baju dan sarung yang layak dalam panti | pare pare | Rp12,604,000 | Rp0 | Rp12,604,000 | SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN/KEMISKINAN EKTREAM |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---|--|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar dalam panti | | | | Rp451,515,800 | Rp0 | Rp451,515,800 | | |
| | | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas untuk ketersediaan data atau NIK | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan pembuatan NIK | Makassar | Rp9,920,000 | Rp0 | Rp9,920,000 | DISABILITAS, SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | Pemberian bimbingan kepada disabilitas terlantar | Jumlah bimbingan disabilitas terlantar yang terlaksana | Makassar | Rp212,271,200 | Rp0 | Rp212,271,200 | DISABILITAS, SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN | |
| | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | Makassar | Rp29,065,600 | Rp0 | Rp29,065,600 | DISABILITAS, SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN | |
| | | Penyediaan Alat Bantu | Pemberian alat bantu | Jumlah disabilitas yang mendapatkan alat bantu | 24 kabupaten/Kota | Rp200,259,000 | Rp0 | Rp200,259,000 | DISABILITAS, SPM, TUPOKSI, KEMISKINAN | |
| | | Grand Total | | | | Rp5,801,843,560 | Rp0 | Rp5,801,843,560 | | |
| 7 | DISNAKER | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | Rp4,515,495,500 | Rp1,000,000,0 | Rp5,515,495,500 | | |
| | | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | Rp4,515,495,500 | Rp1,000,000,0 | Rp5,515,495,500 | STRATEGI 1 | |
| | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | MENGGUNAKAN DANA DID YANG PERUNTUKANNYA PEMBERIAN BANTUAN BARANG | | | | Rp4,515,495,500 | Rp1,000,000,0 | Rp5,515,495,500 | KEMISKINAN |
| | | Grand Total | | | | Rp4,515,495,500 | Rp1,000,000,0 | Rp5,515,495,500 | | |
| | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | Rp3,789,780,000 | Rp0 | Rp3,789,780,000 | | |
| | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | Rp3,789,780,000 | Rp0 | Rp3,789,780,000 | | |
| | | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | "1. Pengawasan dan Pengaturan penempatan rumah ikan 2. Perjadin pengawasan pemanfaatan ruang laut" Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | 9655 Dokumen | | Rp75,000,000 | Rp0 | Rp75,000,000 | Peningkatan Pendapatan Masyarakat | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|--|
| | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | "1. Pengawasan pengembangan budidaya laut (rumput laut, ikan dari hasil tangkapan rumpon dan rumah ikan dasar 2. Perjadin Pengawasan"Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | 5000 Dokumen | | Rp44,720,000 | Rp0 | Rp44,720,000 | Peningkatan Pendapatan Masyarakat |
| | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | "Patroli Pengawasan Di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Fasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha) dan SIPR (surat ijin penempatan rumpon) bagi nelayan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil " | 1000 Dokumen | | Rp3,670,060,000 | Rp0 | Rp3,670,060,000 | Peningkatan Pendapatan Masyarakat |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | Rp4,712,525,200 | Rp3,259,540,0 | Rp7,972,065,200 | |
| | Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | Rp400,000,000 | Rp3,259,540,0 | Rp3,659,540,000 | |
| | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | memberikan pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil | 10 kelompok | Kab/Kota | Rp300,000,000 | Rp0 | Rp300,000,000 | 2.PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT |
| | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Pemberian Bantuan yang diserahkan kepada Masyarakat berupa bantuan Sarana usaha Garam Rakyat /Paket Sarana Inovasi Garam pada kelompok masarakat usaha garam rakyat di Kabupaten dengan Kelompok sasaran kegiatan adalah: Masyarakat Pesisir dan PPK dengan Mekanisme pelaksanaan :penerima manfaat dan berdasarkan data lokus kemiskinan ekstrem di beberapa Kabupaten yang menjadi lokus kermiskinan ekstrem dengan mekanisme penetapan kelompok penerima manfaat bantuan adalah sebagai berikut: 1. Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa sarana usaha Garam Rakyat (Kelompok Masyarakat Usaha Garam) ;2. Kegiatan Koordinasi/konsultasi /verifikasi/monitoring/pembinaan masyarakat/kelompok serta kegiatan undangan koordinasi terkait PUGAR dengan unit/instansi terkait;3. pelaporan pelaksanaan kegiatan | 720 Orang | kabupaten jeneponto, takalar, selayar, pangkep | Rp3,259,540,0 | Rp0 | Rp3,259,540,000 | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 8 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kegiatan ini adalah merupakan peningkatan dan penguatan serta pengembnagan kelembagaan pada kelompok masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil di Kabupaten dengan Kelompok sasaran kegiatan adalah: Masyarakat Pesisir dan PPK dengan mekanisme pelaksanaan adalah sebagai berikut ; 1. Kegiatan Koordinasi ke Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan Kelompok , Kegiatan Verifikasi dan Identifikasi Kelempok penerima, kegiatan monitoring pemanfaatan sarana Prasarana Garam Rakyat termasuk monitoring intervensi ke masyarakat miskin dan miskin ekstrem;2.Kegiatan pelatihan Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat Pesisir; 3. kegiatan pelaporan pelaksanaan Pendampingan manajemen pengelolaan gudang garam Rakyat. | 10 kelompok (100Orang) | Kab/Kota SulSel | Rp100,000,000 | Rp0 | Rp100,000,000 | 2.PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT |
| | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | Rp4,312,525,200 | Rp0 | Rp4,312,525,200 | |
| | | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Melakukan kegiatan sosialisasi dan bimtek terkait mitigasi bencana kepada masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengurangi pengrusakan Sumberdaya di wilayah pesisir dan laut dengan memberdayakan masyarakat miskin yang ada di wilayah pesisir | 100 orang | kabupat en/kota Sul-Sel | Rp100,000,000 | Rp0 | Rp100,000,000 | 3.PENGURANGAN KANTONG-KANTONG KEMISKINAN |
| | | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Sarana Pengelola sampah di Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Konservasi Penyusunan Dokumen RPD KKPD / KK3P dan Pengelolaan KKPD Pangkep Temu Pengelolaan Kawasan Konservasi | | | Rp800,000,000 | Rp0 | Rp800,000,000 | 3.PENGURANGAN KANTONG-KANTONG KEMISKINAN |
| | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | memberdayakan masyarakat pesisir dalam kegiatan penanaman/rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir yang dapat berdampak pada usaha ekonomi masyarakat pesisir Luas wilayah perairan yang terehabilitasi, Jumlah kelompok nelayan diidentifikasi dan diverifikasi, Jumlah kelompok nelayan yang dimonev dan didampingi, Jumlah peserta koordinasi dan fasilitasi pengembangan kawasan mangrove | 61 ha | kabupaten/kota Sul-Sel (Kab.Sinjai, Takalar, Bantaeng, Palopo, Luwu Timur, Kota Makassar, Barru,Bone, Bulukumba, Jeneponto, Luwu, Luwu Uatara, Maros, Pangkep. | Rp3,412,525,200 | Rp0 | Rp3,412,525,200 | 3.PENGURANGAN KANTONG-KANTONG KEMISKINAN |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | Rp4,582,110,000 | Rp3,300,550,0 | Rp7,882,660,000 | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | Rp1,940,400,000 | Rp0 | Rp1,940,400,000 | |
| | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Provinsi | memberian pembinaan dan melakukan pemantauan kegiatan pembudidayaan ikan dilaut dan dikawasan konservasi masyarakat pembudidaya di kabupaten/kota | 40 orang | kabupaten/kota | Rp50,000,000 | Rp0 | Rp50,000,000 | 2.PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT |
| | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Perlindungan Nelayan Calon Penerima Asuransi (orang) Jumlah nelayan yang mendafatkan perlindungan sosial | 10.000 Orang | | Rp184,200,000 | Rp0 | Rp184,200,000 | 1.PENGURANGAN BEBAN PENGELUARAN |
| | | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Rekapitulasi Data dan Pendataan diantaranya ADANYA DATA MASYARAKAT PEMBUDIDAYA IKAN DILAUT YANG TERDAFTAR DALAM P3KE (APLIKASI SIAP BOS) | 1 dokumen | kabupaten/kota | Rp25,000,000 | Rp0 | Rp25,000,000 | 1.PENGURANGAN BEBAN PENGELUARAN |
| | | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | <p>Memberian Bantuan yang diserahkan kepada Masyarakat berupa bantuan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut di Kab/Kota; dengan Kelompok sasaran kegiatan adalah: Masyarakat Pembudidaya dengan mekanisme Pelaksanaan kegiatan adalah: 1. Belanja Barang Yang diserahkan kepada masyarakat (Penyediaan Sarpras Budidaya Rumput Laut) pada kelompok pembudidaya di Kabupaten/Kota;</p> <p>2. Kegiatan Pembinaan/Pelatihan dan pendampingan oleh tenaga penyuluh perikanan; 3. Kegiatan Identifikasi/Verifikasi kelompok penerima dan lokasi di kabupaten /kota; 4. Kegiatan Koordinasi di Kabupaten/Kota dan unit terkait; 5. Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>Sarana Budidaya Rumput Laut Prasarana Budidaya Rumput Laut Sarana Budidaya Komoditi Laut Lainnya (Teripang, Kuda Laut, Echonoder mata),Sarana Budidaya Komoditi Laut (Karamba Jaring Apung, Karamba Dasar Laut)</p> | 540 unit (100 unit untuk kemiskinan) | 19 kabupaten/kota | Rp1,681,200,000 | Rp0 | Rp1,681,200,000 | 1.PENGURANGAN BEBAN PENGELUARAN |
| | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | | | | Rp2,641,710,000 | Rp3,300,550,0 | Rp5,942,260,000 | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|
| | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | bantuan penyediaan benih/benur kepada kelompok masyarakat pembudidaya di kabupaten/kota | 20 unit (950.000 benur) | kabupaten/kota | Rp1,374,460,000 | Rp1,634,000,0 | Rp3,008,460,000 | 2.PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT |
| | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | bantuan benih ikan tawar diperairan umum darat di kabupaten/kota | 350 benih ikan | kabupaten/kota | Rp1,267,250,000 | Rp1,666,550,0 | Rp2,933,800,000 | 2.PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | Rp5,312,210,000 | Rp0 | Rp5,312,210,000 | |
| | Penyelenggaraan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | | | | Rp5,312,210,000 | Rp0 | Rp5,312,210,000 | |
| | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | pemberian bantuan yang diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan rumpon/rumah ikan di kabupaten/kota) dengan mekanisme pelaksanaan adalah: 1. Melakukan kegiatan koordinasi ke kabupaten/kota; 2. melakukan identifikasi/verifikasi lokasi dan kelompok penerima di kabupaten/kota;3.melakukan kegiatan sosialisasi ke kab/kota, bimtek penerapan teknologi rumpon dan manajemen usaha, monev dan pendampingan; 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan | 120 unit | kabupat en/kota | Rp4,481,940,000 | Rp0 | Rp4,481,940,000 | 2.PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT |
| | | pemberian bantuan yang diserahkan kepada masyarakat nelayan berupa, Bantuan mesin, fish finder, rakkang, jaring ikan) di kabupaten/kota dengan mekanisme penerima manfaat adalah | | | | | | |



(LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | :1.Belanja Barang Yang diserahkan pada masyarakat berupa alat bantu penangkapan ikan kepada klp masyarakat nelayan di kab/kota;2. Penyediaan dan Pendampingan Tenaga Pendamping Nelayan di Kab/Kota;3. Kegiatan Koordinasi/identifikasi/verifikasi/monitoring/pembinaan dan tugas kedinasan lainnya dengan unit/institusi terkait; 4.Pelaporan pelaksanaan kegiatan | 5.000 Unit (348 desa) | 19 kabupaten/kota | Rp830,270,000 | Rp0 | Rp830,270,000 | 2.PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT | |
| | | Grand Total | | | | Rp18,396,625,200 | Rp6,560,090,0 | Rp24,956,715,200 | | |
| 9 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | Rp6,836,202,191 | Rp0 | Rp6,836,202,191 | | |
| | | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | Rp6,836,202,191 | Rp0 | Rp6,836,202,191 | 2.PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT | |
| | | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | | | | Rp6,134,960,791 | Rp0 | Rp6,134,960,791 | 2.PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT | |
| | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | Diklat Peningkatan Mutu Produk UMKM Jumlah UMKM yang memahami pengetahuan tentang peningkatan Mutu Produk | Tercapainya UMKM yang memahami pengetahuan tentang Peningkatan Mutu Produk | | | Rp701,241,400 | Rp0 | Rp701,241,400 | 2 Peningkatan Pendapatan Masyarakat |
| | | Grand Total | | | | Rp6,836,202,191 | Rp0 | Rp6,836,202,191 | | |



| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| DP3A | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | Rp250,053,100 | Rp0 | Rp250,053,100 |
| | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | Rp150,053,300 | Rp0 | Rp150,053,300 |
| | Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga | Kegiatan ini dalam bentuk Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga, dimana Sasarannya adalah Langung Ke kelompok Masyarakat melalui OPD Kab/Kota Yang Menangani terkait Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga (1 Laporan) | Kab/kota | Rp150,053,300 | Rp0 | Rp150,053,300 |
| | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | Rp99,999,800 | Rp0 | Rp99,999,800 |
| | Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kegiatan ini dalam rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKS) dalam bentuk Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Bantuan Peralatan untuk masyarakat dan sangat diharapkan adanya tambahan anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (1 Dokumen) | Kab/kota | Rp99,999,800 | Rp0 | Rp99,999,800 |
| | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | Rp520,000,200 | Rp0 | Rp520,000,200 |
| | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi | | | | Rp520,000,200 | Rp0 | Rp520,000,200 |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Kegiatan ini dalam rangka : (1). Peningkatan Kapasitas Perempuan Dalam Bidang Politik, (2) . Menambah wawasan dan kemampuan perempuan dalam upaya meningkatkan Ekonomi keluarga, dan (3). dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrim, perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (48 Lembaga) | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi | Kab/kota | Rp520,000,200 | Rp0 | Rp520,000,200 |
| Grand Total | | | | Rp770,053,300 | Rp0 | Rp770,053,300 | |



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 11 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Rp7,522,053,900 | Rp0 | Rp7,522,053,900 | | |
| | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | Rp7,522,053,900 | Rp0 | Rp7,522,053,900 | STRATEGI 2 | |
| | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Penyediaan Ayam Kampung, Prasarana dan Sarana untuk Rumah Tangga Miskin | Ayam jantan dan betina 1 KELOMPOK TERDIRI 10 RPM, DPT 300 AYAM, MESIN TETAS 1, PAKAN SLM 3 BULAN, OBAT OBATAN | 1.5 Rumah Tangga Miskin TATOR, PANGKE P, SELAYAR, TORAJA UTARA, LUWU, ENREKA NG, PALOPO, BULLUKUMBA, MAROS, BARRU, JENNEPONTO | | Rp7,522,053,900 | Rp0 | Rp7,522,053,900 | 2.PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT |
| | | Grand Total | | | | Rp7,522,053,900 | Rp0 | Rp7,522,053,900 | | |
| 12 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Rp85,391,072,400 | Rp0 | Rp85,391,072,400 | | |
| | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | Rp85,391,072,400 | Rp0 | Rp85,391,072,400 | STRATEGI 2 | |
| | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | 1. bantuan bibit pisang 3juta pohon diberika kepada petani (diharapkan di pcpl ada p3ke), 2. upah pengupasan bonggol pisang semuanya diberikan kepada masyarakat p3ke | | 1. bibit untuk 24 kab/kota 2. Gowa, Bone, Bulukum ba | | Rp85,391,072,400 | Rp0 | Rp85,391,072,400 | 2.PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT |
| | | Grand Total | | | | Rp85,391,072,400 | Rp0 | Rp85,391,072,400 | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | Rp1,451,056,900 | Rp0 | Rp1,451,056,900 | | |
| | | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Rp1,451,056,900 | Rp0 | Rp1,451,056,900 | |



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|--|---|---|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 13 | DINAS PMD | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | Rp240,351,000 | Rp0 | Rp240,351,000 | |
| | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | Rp399,966,000 | Rp0 | Rp399,966,000 | |
| | | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | Rp300,000,000 | Rp0 | Rp300,000,000 | |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | | | | Rp299,995,500 | Rp0 | Rp299,995,500 | |
| | | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | Rp210,744,400 | Rp0 | Rp210,744,400 | |
| | | Grand Total | | | | Rp1,451,056,900 | Rp0 | Rp1,451,056,900 | |
| 14 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | Rp2,560,981,000 | Rp0 | Rp2,560,981,000 | |
| | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | | | | Rp294,850,000 | Rp0 | Rp294,850,000 | |
| | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | Kegiatan kesiapsiagaan bencana dalam bentuk pemberian pengetahuan bencana kepada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan bencana | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp294,850,000 | Rp0 | Rp294,850,000 |
| | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | Rp392,554,000 | Rp0 | Rp392,554,000 | |



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|--|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|
| | | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Kegiatan kesiapsiagaan bencana | Jumlah warga negara dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp145,061,000 | Rp0 | Rp145,061,000 | KEMISKINAN & TUPOKSI | |
| | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Kegiatan pelatihan mitigasi bencana bagi aparat atau stakeholder terkait | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp247,493,000 | Rp0 | Rp247,493,000 | KEMISKINAN & TUPOKSI | |
| | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | Rp1,873,577,000 | Rp0 | Rp1,873,577,000 | |
| | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Kegiatan pengadaan logistik korban bencana alam/non alam | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp1,873,577,000 | Rp0 | Rp1,873,577,000 | KEMISKINAN & PRIORITAS | |
| | | Grand Total | | | | | Rp2,560,981,000 | Rp0 | Rp2,560,981,000 | |
| 15 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | Rp273,000,000 | Rp0 | Rp273,000,000 | | |
| | | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | Rp273,000,000 | Rp0 | Rp273,000,000 | | |
| | | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | | | | Rp273,000,000 | Rp0 | Rp273,000,000 | |



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | DAN PERTANAHAN | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | Rp1,477,056,976 | Rp0 | Rp1,477,056,976 | | |
| | | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | | | | Rp1,477,056,976 | Rp0 | Rp1,477,056,976 | | |
| | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | Pembangunan PSU Kawasan Permukiman | | | | Rp1,477,056,976 | Rp0 | Rp1,477,056,976 | |
| | | Grand Total | | | | Rp1,750,056,976 | Rp0 | Rp1,750,056,976 | | |
| 16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp160,543,500 | Rp0 | Rp160,543,500 | | |
| | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp160,543,500 | Rp0 | Rp160,543,500 | | |
| | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Pendampingan pelaksanaan usaha melalui sekolah Lapang (SL) | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan | Luwu Utara dan Pangkep | | Rp82,863,500 | Rp0 | Rp82,863,500 | 2.Peningkatan Pendapatan Masyarakat |
| | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan fasilitasi sarana usaha wanatani koloni lebah madu berupa stup | Luwu Utara dan Pangkep | | Rp77,680,000 | Rp0 | Rp77,680,000 | 1. Pengurangan Beban Pengeluaran |
| | | Grand Total | | | | Rp0 | Rp0 | Rp0 | | |
| 17 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | Rp210,000,000 | Rp0 | Rp210,000,000 | | |
| | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | | Rp210,000,000 | Rp0 | Rp210,000,000 | STRATEGI 2 | |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | | Rp210,000,000 | Rp0 | Rp210,000,000 | | |
| | | Grand Total | | | | Rp210,000,000 | Rp0 | Rp210,000,000 | | |



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---------------|--|--|
| 18 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | Rp997,872,433 | | |
| | | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | | Rp997,872,433 | | |
| | | Pelatihan dan Pendampingan IKM Tembakau | DBHCT | | Sinjai & Soppeng | Rp300,000 | | |
| | | Bimbingan Tehnis dan Pendampingan Industri Pengolahan Hasil Pertanian Komoditi Pisang menjadi secondary produk berupa Tepung pisang, Minuman Siap Saji, Selai Pisang, dan Manisan Pisang | Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan IKM dan Tim PKK | | Makassar, Bantaen g, Luwu dan Jeneponto | Rp500,000 | | |
| | | Pelatihan dan Pendampingan Industri Meubel berbahan Baku bambu | Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan IKM dan Dekranasda Prov dan Kab | | Maros | Rp996,672,433 | | |
| | | Pelatihan dan Pendampingan Industri Kreatif (Sablon) dalam mendukung Pengembangan Destinasi wisata | Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan IKM dan Dekranasda Prov dan Kab | | Bulukumba | | | |
| | | Pelatihan dan Pendampingan diversifikasi industri coklat sebagai produk souvenir | Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan IKM dan Tim PKK | | Makassar | | | |
| | | Pelatihan dan Pendampingan diversifikasi olahan hasil perikanan | Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan IKM dan Tim PKK | | Bone | | | |
| | | Pelatihan dan Pendampingan diversifikasi olahan hasil perkebunan (sagu) | Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan IKM dan Tim PKK | | Luwu Utara | | | |
| | | Pelatihan dan Pendampingan industri meubel dengan memanfaatkan limbah kayu | Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan IKM dan Dekranasda Prov dan Kab | | Pinrang | | | |
| | | Pelatihan dan Pendampingan IKM Tekstil (Batik Sarita) | Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan IKM dan Dekranasda Prov dan Kab | | Tana Toraja | | | |
| Pelatihan dan Pendampingan Industri Berbasis Elektronika (Service HP) | Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan IKM dan Assosiasi | | Luwu Timur | | | | | |



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|-------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | Kepesertaan dalam Gelar Produk di Pameran OTOP (one Tambun one Product) di Bangkok | Pameran Komoditi Pisang dan Olahan Pisang | | Thailand | Rp400,000 | | | |
| | | Grand Total | | | | Rp997,872,433 | | | |
| 19 | Bappelitb angka | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | |
| | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | | | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1. Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar pusat dan daerah, antarsektor dengan lokasi dan sasaran yang telah ditentukan terutama pada wilayah kantong kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan | 24 Kabupaten/kota | Rp318,815,000 | | | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Pemerintah Provinsi | 24 Kabupaten/Kota | Rp924,568,000 | | | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | |
| | | Grand Total | | | | Rp 1,243,383,000 | | | |



4.4 Pemutakhiran Data P3KE

Progress verifikasi dan validasi Data P3KE Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dalam rekapitulasi Kemiskinan Ekstrem TPN2K dengan P3KE dan Data Verval Kabupaten/ Kota Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rekap Kemiskinan Ekstrem TNP2K x P3KE x Data Verval Kab/Kota Tahun 2023

| NO | KABUPATEN | Estimasi TNP2K 2022 | P3KE DESIL 1 | | Data Verval Kab/Kota DESIL 1 | | No SK |
|----|-------------------|---------------------|--------------|--------|------------------------------|--------|---|
| | | | KK | Jiwa | KK | Jiwa | |
| 1 | Kepulauan Selayar | 4,590 | 3,154 | 15,857 | 1,738 | 8,355 | SK Bupati No.616/X/Tahun 2023 |
| 2 | Bulukumba | 6,553 | 7,335 | 37,004 | - | 20,731 | SK masih berproses |
| 3 | Bantaeng | 3,104 | 4,000 | 18,492 | 3,350 | 1,681 | SK Bupati No.100.3.3.2/678/Bappeda/III/2023 |
| 4 | Jeneponto | 16,625 | 13,120 | 61,287 | - | 2,229 | SK Bupati No.100.3.3.2/401/2023 |
| 5 | Takalar | 1,629 | 5,490 | 26,315 | 5,490 | - | SK Bupati No.439 Tahun 2023 |
| 6 | Gowa | 9,061 | 13,078 | 68,255 | 371 | 1,108 | SK Bupati No.614/XI/2023 |
| 7 | Sinjai | 3,427 | 5,285 | 29,984 | 4,048 | 23,532 | SK Bupati No.787 Tahun 2023 |



**LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH (LP2KD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

| NO | KABUPATEN | Estimasi TNP2K 2022 | P3KE DESIL 1 | | Data Verval Kab/Kota DESIL 1 | | No SK |
|----|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------|------------------------------------|--------|--|
| | | | KK | Jiwa | KK | Jiwa | |
| 8 | Maros | 9,004 | 8,173 | 40,946 | - | 1,884 | SK Bupati 573/KPTS/070/III/2023 |
| 9 | Pangkajene dan Kepulauan | 11,986 | 12,404 | 60,266 | 18,632 | 1,945 | SK Bupati No.876 Tahun 2023 |
| 10 | Barru | 533 | 3,495 | 18,704 | - | 13,160 | SK Bupati No.250/Bappelitbangda/ V/2023 |
| 11 | Bone | 7,536 | 22,058 | 115,398 | 9,532 | 66,029 | SK Bupati No.127 Tahun 2023 |
| 12 | Soppeng | 3,326 | 4,610 | 23,751 | 1,641 | 8,440 | SK Bupati No.498/XI/2023 |
| 13 | Wajo | 4,472 | 7,731 | 39,398 | - | 1,856 | SK Bupati No.250/Bappelitbangda /V/Tahun 2023 |
| 14 | Sidenreng Rappang | 2,962 | 3,983 | 21,156 | 4,244 | 18,180 | SK Bupati No.404/V/2023 |
| 15 | Pinrang | 2,075 | 8,852 | 47,184 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--------|-------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| 16 | Enrekang | 6,366 | 6,394 | 37,243 | - | 13,412 | SK masih berproses |
| 17 | Luwu | 7,319 | 9,115 | 54,140 | - | 2,215 | SK Bupati No.626/VIII/2023 |
| 18 | Tana Toraja | 2,621 | 7,054 | 45,002 | 18,044 | 55,169 | SK Bupati No.476/XI/Tahun 2023 |
| 19 | Luwu Utara | 10,863 | 9,997 | 53,250 | 5,572 | 23,088 | SK Bupati No.188.4.45/123/I/2023 |



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| NO | KABUPATEN | Estimasi TNP2K 2022 | P3KE DESIL 1 | | Data Verval Kab/Kota DESIL 1 | | No SK |
|--------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|--|
| | | | KK | Jiwa | KK | Jiwa | |
| 20 | Luwu Timur | 1,385 | 4,559 | 25,227 | 15,465 | - | SK masih berproses |
| 21 | Toraja Utara | 3,986 | 5,061 | 33,984 | - | 5,326 | SK Bupati No.352/IV/2023 |
| 22 | Kota Makassar | 14,441 | 15,653 | 85,461 | 7,860 | 47,407 | SK Walikota No.3113/188.4.45/thn 2023 |
| 23 | Kota Parepare | 488 | 1,600 | 9,226 | - | 182 | SK Walikota No. 685 Tahun 2023 |
| 24 | Kota Palopo | 4,147 | 3,022 | 17,162 | - | 9,853 | SK Walikota No.100.3.3.3/325/b.hukum |
| TOTAL | | 138,499 | 185,223 | 984,692 | 95,987 | 325,782 | |



BAB 5 PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial yang tidak hanya dialami oleh Negara-negara berkembang, tetapi dialami oleh Negara yang sudah mempunyai keamanan dibidang ekonomi, fenomena ini pada dasarnya telah menjadi perhatian, isu dan gerakan global yang bersifat kemanusiaan. Kemiskinan sangat erat dengan kualitas sumber daya manusia, kemiskinan muncul karena sumber daya manusia tidak berkualitas, demikian pula sebaliknya meningkatnya kualitas sumber daya manusia mengandung upaya penghapusan kemiskinan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak mungkin dapat dicapai bila penduduk masih dibelenggu kemiskinan. Oleh karena itu dalam pengembangan sumber daya manusia salah satu program yang harus dilaksanakan dalam upaya mengurangi dan menghapuskan kemiskinan.

Selain itu, penanggulangan kemiskinan juga perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat serta berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas dan transparansi serta pengutamaan kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Oleh karena itu, focus pembangunan manusia tidak hanya pada laju pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga pada aspek distribusinya, bukan pada masalah berapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, tetapi apakah pertumbuhan tersebut dapat dinikmati oleh semua lapisan



masyarakat. Perhatian harus lebih ditujukan pada struktur dan kualitas dari pertumbuhan itu sendiri, untuk menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan manusia baik generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan atas pendekatan hak. Pendekatan berbasis hak dalam penanggulangan kemiskinan mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif.

Problematika kemiskinan lebih banyak melekat kepada individu/perorangan, namun bukan berarti semata-mata adalah tanggung jawab individu, melainkan harus menjadi pekerjaan seluruh komponen bangsa/stakeholders, mulai dari lembaga birokrat/aparat pemerintah, lembaga swasta dan sampai pada lapisan masyarakat.

Dokumen LP2KD sebagai laporan pelaksanaan dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dalam setiap tahun anggaran. Dokumen ini terbuka untuk dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan. Dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2023 ini adalah bagian dari review dan evaluasi pelaksanaan arah kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan target mendekati 0% pada tahun 2024 sesuai amanat Inpres Nomor 4 tahun 2022, serta menjadi pijakan dalam upaya perbaikan dan penciptaan kesejahteraan masyarakat pada tahun - tahun mendatang.

daerah dalam mengejar target angka kemiskinan dan disparitas kemiskinan antara desa dan kota semakin mengecil.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan kontribusinya dalam penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan lintas sector dalam merumuskan kebijakan dalam Upaya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Desember 2023

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
Selaku Ketua

TKPK Provinsi Sulawesi Selatan



Dr. SETIAWAN ASWAD, MDevPIg

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP: 19730825 199203 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin, Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanawata'ala, Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 telah tersusun.

Kemiskinan merupakan permasalahan tematik yang kompleks dan menjadi salah satu isu strategis prioritas Nasional untuk ditangani secara bersama. Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 tahun 2022; tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah menargetkan angka kemiskinan ekstrem tahun 2024 dapat diturunkan secara signifikan mendekati 0%. Dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur Presiden Joko Widodo tersebut, dibutuhkan sinkronisasi, koordinasi dan upaya bersama yang melibatkan seluruh Stakeholder, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara sinergi dan berkesinambungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pada pemerintah desa dan kelurahan.

Dokumen LP2KD ini disusun berdasarkan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelerasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi. Dokumen LP2KD Ini merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

LP2KD ini secara garis besar berisi pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2023. Dokumen ini berisi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan mulai dari rencana tagging dan realisasi anggaran program penanggulangan kemiskinan. LP2KD tahun 2023 disusun oleh tim TKPK Provinsi Sulawesi Selatan berupaya memberi gambaran yang komprehensif kepada para pembaca tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh elemen baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah